



KECAMATAN WOTU

KANTOR CAMAT
LUWU TIMUR

LAPORAN KINERJA

Triwulan III Tahun Anggaran 2025



Jalan A. Pandangai No. 1, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur,
Sulawesi Selatan.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kami kepada Allah Yang Maha Kuasa, karena hanya atas Rahmat dan Karunia-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 Triwulan III. Laporan ini disusun dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Disamping itu, dalam meningkatkan kualitas pelayanan ini, dilakukan berbagai penyempurnaan terhadap sumber daya manusia yang ada serta sistem ketatalaksanaan yang berlaku yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Materi Laporan antara lain menguraikan tentang capaian Indikator Kinerja Utama yang telah dicapai oleh Kantor Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur, juga termuat isu strategis yang dihadapi berikut tindak lanjut yang dilakukan oleh Kantor Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur.

Akhir kata, kami berharap agar Laporan Kinerja ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja bagi seluruh perangkat organisasi Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur.

Wotu, 07 Oktober 2025

Camat Wotu,



HASIS DAWI, S.Sos., M.Si

angkat : Pembina Tk.I

NIP : 19700908 200312 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Maksud dan Tujuan	4
1.3 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah	5
1.4 Sumber Daya Aparatur	10
1.5. Isu Strategis	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA	15
2.1 Rencana Strategis	15
2.2. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah	15
2.3. Indikator Kinerja Utama	16
2.4. Perjanjian Kinerja	20
2.5. Rencana Anggaran Kecamatan Wotu Tahun 2025	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	27
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	27
3.2 Analisis Capaian Kinerja	29
3.2.1. Capaian Sasaran Strategis I	30
3.2.2. Capaian Sasaran Strategis II	54
3.3. Realisasi Anggaran	66
3.4. Budaya Kerja Mempengaruhi Pencapaian Organisasi	84
BAB IV PENUTUP	85

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja Triwulan III Perangkat Daerah disusun sebagai wujud akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan program, dan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis. Penyusunan laporan ini merupakan bagian dari kewajiban untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, efisien, serta berorientasi pada hasil.

Melalui laporan kinerja ini, dapat diketahui sejauh mana capaian indikator kinerja utama maupun indikator kinerja program yang telah dilaksanakan pada periode Triwulan III yaitu Juli-September 2025. Selain itu, laporan ini juga menjadi sarana evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan, identifikasi hambatan yang dihadapi, serta dasar dalam merumuskan langkah perbaikan dan strategi tindak lanjut pada triwulan berikutnya.

Dengan adanya laporan kinerja ini, diharapkan Kantor Kecamatan Wotu mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, memperkuat koordinasi antar bidang, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah secara menyeluruh sesuai dengan visi dan misi pemerintah daerah Kabupaten Luwu Timur.

1.2 Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Triwulan III Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama 1 (satu) triwulan dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan ini juga menjadi alat kendali untuk menganalisis capaian setiap program dan kegiatan serta mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam Laporan Kinerja ini, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang.

1.3 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur :

1. **Camat;** sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a mempunyai tugas pokok membantu bupati dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pemerintahan umum;
 - b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat desa;
 - c. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang ketentraman dan ketertiban umum
 - d. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pelayanan umum.
2. **Sekretaris Camat;** dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang perencanaan dan kepegawaian;
 - b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang umum dibidang umum dan keuangan; dan
 - c. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Sekretaris camat membawahi beberapa bagian dan seksi antara lain :

- 1) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian** sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huru b angka 1 dipimpin oleh seorang kepala subbagian mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan pengumpulan bahan dan mengelola penyusunan perencanaan, penyajian data dan penyusunan laporan kinerja mengelola administrasi kepegawaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan kepegawaian;
- b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas dibidang perencanaan dan kepegawaian;
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi;

- 2) Subbagian Umum dan Keuangan** sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf b angka 2 dipimpin oleh seorang kepala Subbagian mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan ketatausahaan, administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang, urusan rumah tangga serta menghimpun bahan dan mengelola administrasi keuangan meliputi penyusunan anggaran, penggunaan, pembukuan, pertanggungjawaban dan pelaporan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan

Kepala Subbagian Umum dan Keuangan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) penyelenggaraan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang umum dan keuangan;
- b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas dibidang umum dan keuangan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang umum dan keuangan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuan dengan tugas dan fungsinya.

- 3. Seksi Pemerintahan Umum** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huru c dipimpin oleh seorang kepala seksi, mempunyai **tugas** pokok memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di seksi pemerintahan umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan

Kepala seksi pemerintahan umum dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang pemerintahan umum
- b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas dibidang pemerintahan umum
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemerintahan umum
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

- 4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa** sebagaimana dimaksud dalam pasl 2 ayat (2) huruf d dipimpin oleh kepala seksi, mempunyai **tugas pokok** memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa. Adapun uraian tugas kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggaran fungsi :

- a. Penyimpan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat desa
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- 5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;** sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf e dipimpin oleh seorang kepala seksi, mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan diseksi ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Kepala seksi ketentraman dan ketertiban umum dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

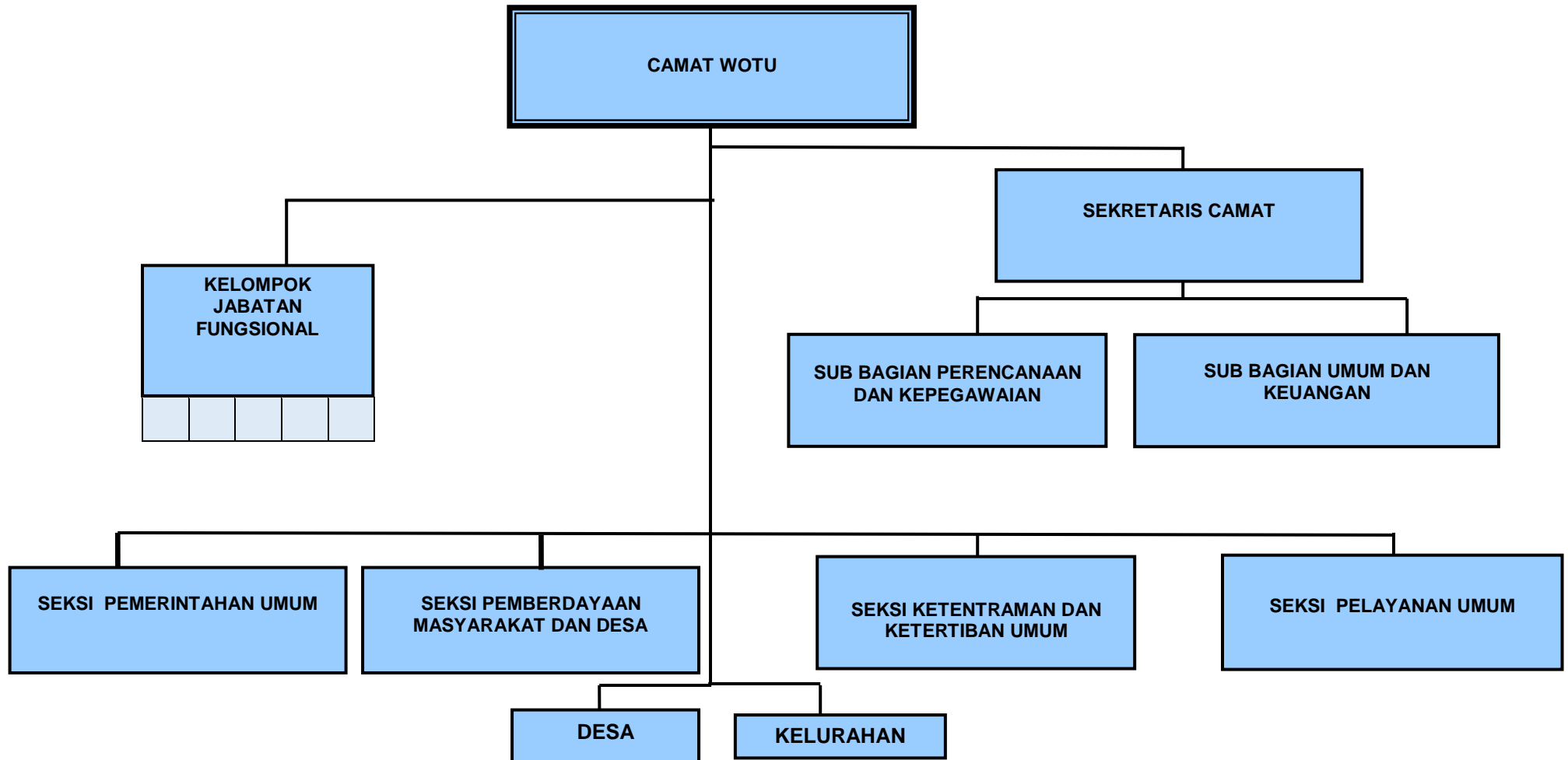
- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang ketentraman dan ketrtiban umum;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- 6. Kepala Seksi Pelayanan Umum;** sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf f dipimpin oleh seorang kepala seksi, mempunyai **tugas pokok** memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan diseksi pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Kepala seksi pelayanan umum, dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan umum;
- b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang pelayanan umum;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan umum;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Wotu



Sumber: Peraturan Bupati No 56 Tahun 2016

1.4 Sumber Daya Aparatur

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Wotu secara optimal sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal, sarana dan prasarana, anggaran yang proporsional dan memadai, Sistem Prosedur serta Standar Pelayanan Minimal (SPM). Secara keseluruhan keadaan dan jumlah Aparatur di Kantor Kecamatan Wotu dan Kantor Kelurahan Wotu adalah 25 (Dua Puluh Lima) orang ASN dan 4 (Empat) orang Non ASN dengan rincian sebagai berikut :

1. Berdasarkan Golongan

Berdasarkan data Kepegawaian, jumlah pegawai negeri sipil Kecamatan Wotu pada tahun 2025 Sebanyak 25 Orang, yang tersebar dalam Enam golongan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1 Jumlah ASN Berdasarkan Golongan

NO.	GOLONGAN	RUANG				JUMLAH
		A	B	C	D	
1	Golongan IV	1	1	-	-	2
2	Golongan III	4	5	1	3	13
3	Golongan II	-	-	2	4	6
4	Golongan I	-	-	-	-	-
5	Golongan IX	2				2
6	Golongan V	2				2
JUMLAH						25

Sumber : Kecamatan Wotu, data diolah tahun 2025

2. Berdasarkan Pendidikan

Berdasarkan tingkat pendidikan, Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kecamatan Wotu memiliki latar belakang pendidikan yang beragam, mulai dari tingkat SMA/SMP hingga Strata 2 (S2). Komposisi tingkat pendidikan ini mencerminkan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki dan menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung efektivitas pelaksanaan tugas pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat. Rincian jumlah ASN menurut golongan dan jenjang pendidikan disajikan pada Tabel 1.2 berikut:

Tabel 1.2 Jumlah ASN Berdasarkan Pendidikan

NO.	GOLONGAN	JENJANG PENDIDIKAN				JUMLAH
		S2	S1/D4	D2/D3	SMA/SMP	
1	Golongan IV	2	-	-	-	2
2	Golongan III	-	11	-	2	13
3	Golongan II	-	-	-	6	6
4	Golongan I	-	-	-	-	-
5	Golongan IX	-	2	-	-	2
6	Golongan V	-	-	-	2	2
JUMLAH		2	13		10	25

Sumber : Kecamatan Wotu, data diolah tahun 2025

3. Berdasarkan Jabatan

Berdasarkan jabatan, Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kecamatan Wotu terbagi ke dalam tiga kelompok, yaitu jabatan struktural dan jabatan fungsional. Pembagian ini mencerminkan peran dan tanggung jawab masing-masing ASN dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan publik. Sebaran jumlah ASN menurut jabatan dan eselon disajikan pada Tabel 1.3 berikut, yang menunjukkan bahwa sebagian besar ASN menduduki jabatan struktural, khususnya pada eselon IV A/B dan non eselon.

Tabel 1.3 Jumlah ASN Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Eselon				Jumlah
		II/A	III A/B	IV A/B	Non Eselon	
1	Struktural	0	2	6	11	19
2	Fungsional	0	2	0	0	2
3	Fungsional Umum	0	0	0	0	0
JUMLAH		0	4	6	11	21

Sumber : Kecamatan Wotu, data diolah tahun 2025

4. Berdasarkan Status Kepegawaian

Berdasarkan status kepegawaian, Aparatur Sipil Negara (ASN) pada unit kerja ini terdiri atas beberapa kategori, yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS), Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian

Kerja (PPPK), serta tenaga dengan status upah jasa. Komposisi ini menggambarkan keberagaman status kepegawaian yang berperan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Wotu. Rincian jumlah ASN menurut status kepegawaian dapat dilihat pada Tabel 1.4 berikut.

Tabel 1.4 Jumlah ASN Berdasarkan Status Kepegawaian

STATUS KEPEGAWAIN		JUMLAH
1	PNS	19
2	CPNS	2
3	PTT	-
4	PPPK	4
5	UPAH JASA	4
JUMLAH		29

Sumber : Kecamatan Wotu.

5. Sarana Prasarana

Adapun pada sarana prasarana Kecamatan Wotu memiliki sebuah gedung diatas lahan tanah seluas 3.745 M². Rumah Jabatan Camat dibangun diatas lahan tanah seluas 1.295 M². Serta berdasarkan Laporan Inventarisasi Asset OPD Kecamatan Wotu , sarana prasarana yang dimiliki sampai dengan akhir tahun 2024 antara lain :

Tabel 1.5 Sarana dan Prasarana

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
	Kecamatan :		
1.	Rujab	1 Unit	Baik
2.	Gedung Kantor	1 Unit	Baik
3.	Gedung Serba Guna	1 Unit	Baik
4.	Tanah Kantor Camat	3,745 M ²	Baik
5.	Tanah Bangunan Rujab	1,295 M ²	Baik
6.	Mobil Operasional Camat	1 Unit	Baik
7.	Sepeda Motor	5 Unit	Baik
8.	Meja Rapat	5 Buah	1 Kurang Baik
9.	Meja Kerja b1/2 biro	11 Buah	Baik

10.	Kursi Kerja Putar	13 Buah	10 Baik, 3 Rusak
11.	Kursi Rapat	145 Buah	Baik
12.	Kursi Tamu	4 Buah	Baik
13.	AC ½ PK	3 Unit	Baik
14.	Lemari Arsip Kayu	2 Buah	Baik
15.	Komputer / PC	5 Buah	4 Baik, 1 Rusak
16.	Printer	6 Buah	5 Baik, 1 Rusak
17.	Lemari Filling Kabinet	5 Buah	Baik
18.	Laptop	5 Buah	Baik
19.	Papan Pengumuman	1 Buah	Baik
20.	Mic	1 Set	Baik
21.	Mesin Rumput Potong Gendong	2 Buah	1 Baik , 1 Rusak
22.	Dispenser	2 Buah	Baik
23.	Lori-Lori	2 Buah	Baik
24.	Pompa Tangan	2 Buah	Baik
25.	Bangku Tunggu Besi	3 Buah	Baik
26.	Kipas Angin	4 Buah	Baik
27.	Layar Proyektor	1 Buah	Baik
28.	Sound System	2 Set	Baik
29.	Genset	1 Buah	Baik

Sumber data : Kecamatan Wotu

1.5. Isu Strategis

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kantor Kecamatan Wotu selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Luwu Timur, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai

pada lingkup Pemerintahan Kabupaten, Provinsi dan Nasional terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak.

Dalam upaya mewujudkan akuntabilitas instansi pemerintah, pada Kantor Kecamatan Wotu juga tentunya ditemukan permasalahan. Adapun permasalahan yang dihadapi Kantor Kecamatan Wotu dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya antara lain :

1. Kualitas SDM yang masih minim.
2. Terbatasnya anggaran yang dikelola untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pelayanan.
3. Koordinasi perencanaan antar SKPD/Instansi belum optimal.
4. Jumlah personil belum seimbang dengan beban tugas.
5. Pemanfaatan referensi data dan informasi masih rendah.
6. Pemanfaatan sarana dan prasarana kerja belum optimal.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Renstra (Rencana Strategis) Kantor Kecamatan Wotu disusun berpedoman pada Peraturan Daerah kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi kecamatan Wotu sebagai Perangkat Daerah di Luwu Timur. Kemudian berdasarkan Dokumen Renstra tersebut akan menjadi pedoman dalam penyusunan Dokumen Renja (Rencana Kerja) Tahunan Kecamatan Wotu.

Dalam upaya Mewujudkan Visi Pemerintah Daerah kabupaten Luwu Timur yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Luwu Timur 2021-2026 yaitu **“Luwu Timur Berkelanjutan dan lebih maju berlandaskan nilai agama dan budaya”** maka Kantor Kecamatan Wotu Melaksanakan Misi Ke-4 dari Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yaitu **“Menciptakan Kepemerintahan dan Pelayanan Publik yang lebih baik”** sebagai amanat bagi kantor Kecamatan Wotu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

2.2. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah

Perumusan Tujuan dan Sasaran Perangkat daerah yang jelas akan memberikan Perangkat Daerah Arah Kerja yang lebih terukur, mampu menyusun strategi dan kebijakan yang tepat, serta dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang dimiliki dalam mencapai visi dan misi Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026. Selain itu, tujuan dan sasaran menjadi instrumen penting untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, sekaligus memastikan setiap program dan kegiatan benar-benar mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan perangkat daerah merupakan arah atau kondisi ideal yang ingin dicapai dalam jangka menengah (lima tahun), sejalan dengan visi dan misi pemerintah daerah, berikut disajikan Tujuan Kecamatan Wotu :

“Meningkatnya kapasitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan Kecamatan Wotu”

Sementara itu, **sasaran perangkat daerah** adalah hasil yang lebih spesifik dan terukur yang ingin dicapai sebagai penjabaran dari tujuan. Adapun sasaran dari Kecamatan Wotu adalah Sebagai Berikut:

1. Meningkatnya kemampuan pelayanan publik penyelenggaraan urusan pemerintahan Kecamatan Wotu.
2. Meningkatnya capaian kinerja dan keuangan penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan Wotu.

2.3. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan yang digunakan perangkat daerah untuk menilai pencapaian tujuan dan sasaran strategis. IKU bersifat spesifik, terukur, relevan, dan menjadi tolak ukur utama yang memastikan perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi kinerja berjalan efektif. Tanpa IKU, tujuan pembangunan hanya bersifat normatif dan sulit diukur pencapaiannya.

Dasar hukum penyusunan IKU tercantum dalam **Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP** dan **PermenPANRB Nomor 53 Tahun 2014**, yang mewajibkan setiap instansi pemerintah merumuskan indikator kinerja utama sebagai bagian dari manajemen kinerja. Dengan demikian, IKU bukan hanya instrumen administratif, tetapi juga pondasi penting dalam memastikan setiap program dan kegiatan perangkat daerah benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Pada tabel berikut ini dapat dilihat Matriks hubungan antara Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja Utama dan Target Kecamatan Wotu dalam Perencanaan Strategis Tahun 2021-2026.

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Wotu

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional/Formulasi Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya Kemampuan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Kecamatan Wotu	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	<ul style="list-style-type: none"> Indeks Kepuasan Masyarakat adalah data dan informasi mengenai tingkat kepuasan masyarakat berdasarkan hasil pengukuran dari pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan public yang sesuai antara harapan dan kebutuhan. Hasil pengukuran dari kegiatan survey kepuasan masyarakat berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat), dengan kategori : <ul style="list-style-type: none"> Tidak baik dengan nilai presepsi 1 Kurang baik dengan nilai presepsi 2 Baik dengan nilai presepsi 3 Sangat baik dengan nilai presepsi 4 	<ul style="list-style-type: none"> Tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan public (rumah sakit) dengan pengisian kuesioner. Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan public adalah melalui penyusunan indeks kepuasan masyarakat (IKM) sebagai tolak ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan rumah sakit Indeks kepuasan masyarakat dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang 	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Camat

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI	WUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1,00-2,5996	25,00-64,99	D	TIDAK BAIK
2	2,60-3,064	65,00-76,60	C	KURANG BAIK
3	3,0644-3,532	76,63-86,30	B	BAIK
4	3,5324-4,00	86,33-100,00	A	SANGAT BAIK

			$\text{Nilai Perunsur} = \frac{\text{Jumlah Per Unsur}}{\text{Jumlah Responden}}$ $\text{Bobot Nilai Penimbang} = \frac{1}{\text{Total Unsur}}$ $\text{Nilai Persepsi Tertimbang:} = \text{Total Nilai Perunsur} \times \text{Nilai Penimbng}$ $\text{IKM} = \text{Total Nila Persepsi Tertimbang} \times 25$	masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya		
2	Meningkatnya capaian kinerja dan keuangan penyelenggaraan	Nilai AKIP Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> Nilai AKIP adalah data dan informasi yang menggambarkan tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berdasarkan hasil pengukuran terhadap kualitas 	Tingkat akuntabilitas kinerja organisasi yang diperoleh dari hasil pengukuran secara	LHE Inspektorat Kabupaten Luwu Timur	Camat

	urusan pemerintahan kecamatan Wotu		<p>perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pencapaian kinerja organisasi sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nilai Hasil pengukuran dari Nilai AKIP di Konversi menjadi 6 Kategori yaitu: <ul style="list-style-type: none"> • Sangat memuaskan (AA)= 90-100 • Memuaskan (A)= 81-89 • Sangat Baik (BB)= 70-79 • Baik (B)= 60-69 • Cukup (CC)= 50-59 • Kurang (C)= 40-49 • Sangat Kurang (D)= 1-30 • E= 0 • Formulasi: $\text{Nilai AKIP} = (0,30 \times \text{Nilai Perencanaan}) + (0,30 \times \text{Nilai Pengukuran}) + (0,15 \times \text{Nilai Pelaporan}) + (0,25 \times \text{Nilai Evaluasi Internal})$ 	<p>kuantitatif terhadap kualitas perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja perangkat daerah melalui instrumen evaluasi AKIP.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah melalui penyusunan Nilai AKIP yang berfungsi sebagai tolak ukur dalam menilai tingkat keberhasilan perencanaan, pelaksanaan, serta pencapaian kinerja organisasi. 		
--	------------------------------------	--	---	---	--	--

Tabel 2.2

Tujuan , Sasaran, Indikator Kinerja Utama, Dan Target Kecamatan Wotu

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Transisi 2021	Target Kinerja Pada Tahun					Kondisi Akhir RENSTRA
				2022	2023	2024	2025	2026	
Meningkatnya kapasitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan Kecamatan Wotu	Meningkatnya kemampuan pelayanan publik penyelenggaraan urusan pemerintahan Kecamatan Wotu	Tingkat Pertumbuhan IKM	2	2	2,56	2,5	1,21	2,40	2,40
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	75	78	80	82	85	85	85
	Meningkatnya capaian kinerja dan keuangan penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan Wotu	Nilai LAKIP Kecamatan Wotu	50,63	73	77	81	82	82	82

Sumber: Kecamatan Wotu

2.4. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah dokumen kesepakatan antara Atasan dan bawahan untuk melaksanakan program, kegiatan, serta target kinerja tertentu dalam kurun waktu tertentu. Dokumen ini memuat sasaran, indikator, dan target kinerja yang harus dicapai dalam satu periode. Dokumen ini berfungsi sebagai kontrak kinerja yang menunjukkan komitmen bersama dalam mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Keberadaan perjanjian kinerja sangat penting dalam perencanaan karena memberikan arah yang jelas, menjadi dasar penyusunan strategi dan pengelolaan sumber daya, serta memudahkan proses monitoring dan evaluasi kinerja. Selain itu, perjanjian kinerja juga memperkuat akuntabilitas dan transparansi, sehingga hasil pembangunan dapat diukur secara obyektif dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Penyusunan Perjanjian Kinerja 2025 dilakukan dengan mengacu kepada RENSTRA (Rencana Strategis) 2021-2026, RENJA (Rencana Kerja) 2025, IKU dan

APBD 2025, dimana Kecamatan Wotu akan melaksanakan 6 Program, 17 Kegiatan, dan 33 Sub Kegiatan.

Untuk dapat mengukur Keberhasilan implementasi dari rencana strategis Tahun 2025, Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur telah menetapkan target untuk masing masing Indikator Kinerja Utama yang harus dicapai sebagai pelaksanaan dari program, kegiatan, dan sub kegiatan. Adapun Penetapan/Perjanjian Kinerja Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Kecamatan Wotu Tahun 2025

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kemampuan pelayanan publik penyelenggaraan urusan pemerintahan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85
2	Meningkatnya capaian kinerja dan keuangan penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan Wotu	Nilai LAKIP Kecamatan Wotu	83

Sumber: Kecamatan Wotu, data diolah tahun 2025

Penetapan Kinerja dengan sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Wotu Tahun 2025 didukung dengan pembiayaan APBD Kabupaten Luwu Timur Sebesar Rp. 2.949.577.075 (Dua Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Tujuh Puluh Lima Rupiah). Anggaran tersebut terdiri dari belanja Operasi sebesar Rp.2.932.577.075 dan belanja modal sebesar Rp. 17.000.000. Secara lengkap anggaran pada program Kecamatan Wotu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4 Program dan Anggaran

No	Program	Anggaran	Kegiatan
1	Program Penjunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp2.841.842.675	APBD
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp6.019.500	APBD
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp62.231.750	APBD
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp9.175.000	APBD
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp25.248.500	APBD
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp5.059.650	APBD

2.5. Rencana Anggaran Kecamatan Wotu Tahun 2025

Rencana anggaran merupakan bagian penting yang berfungsi sebagai instrumen pendukung dalam pelaksanaan Perjanjian Kinerja. Rencana anggaran disusun untuk memastikan bahwa setiap program, kegiatan, dan subkegiatan yang tercantum dalam dokumen perencanaan benar-benar sejalan dengan sasaran kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Agar target tersebut dapat direalisasikan secara efektif, diperlukan dukungan sumber daya, terutama berupa anggaran yang memadai dan tepat sasaran.

Oleh karena itu, penyusunan anggaran dilakukan secara terintegrasi dengan dokumen perencanaan daerah seperti Renstra, Renja, dan RKPD, serta dituangkan dalam APBD. Hal ini sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta PermenPANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja.

Adapun rincian anggaran tersebut dirincikan berdasarkan Program, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.5 Sasaran, Progra, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Anggaran

SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	PAGU
Meningkatnya Kemampuan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Kecamatan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	4.320.000
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	4.320.000
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	3 Laporan	4.320.000

	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	40.231.750
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	40.231.750
	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	5 Lembaga Kemasyarakatan	11.512.950
	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	3 Laporan	28.718.800
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	7.375.000
	Koordinasi upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	4.600.000
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	2.625.000
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan tokoh masyarakat	1 Laporan	1.975.000
	Koordinasi Penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100%	2.775.000
	Koordinasi/Sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang Penegakan peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	2.775.000
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	14.803.500
	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	100%	14.803.500

	Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	3 Dokumen	14.803.500
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	3.809.650
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	3.809.650
	Fasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	0 Dokumen	2.484.850
	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Pedesaan di Wilayah Kecamatan	17 Laporan	1.324.800
Meningkatnya Capaian kinerja dan keuangan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Wotu	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	1.970.662.344
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	20.841.500
	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	1 dokumen	9.075.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0 dokumen	524.950
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 dokumen	2.724.850
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	8.516.700
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	1.612.560.994
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	19 Orang/bulan	1.599.610.994

	Koordinasi dan penyusunan laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan	12.950.000
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	5.790.000
	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	1 Laporan	5.790.000
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	14.349.850
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3 Dokumen	2.681.850
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	1 Orang	11.668.000
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	138.785.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9 Paket	2.125.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6 Paket	4.560.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3 Paket	5.000.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10 Dokumen	2.100.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3 Laporan	95.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	30.000.000
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	17.000.000
	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	unit	17.000.000
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	130.635.000
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 Laporan	7.130.000

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 Laporan	22.000.000
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 Laporan	5.025.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan	96.480.000
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	30.700.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5 unit	13.950.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8 Unit	6.750.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	10.000.000
		JUMLAH	2.041.202.244

Sumber: Kecamatan Wotu

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan program dan kegiatan secara transparan, efektif, dan berorientasi pada hasil. Prinsip ini menekankan keterkaitan antara perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, dan pelaporan sehingga setiap penggunaan sumber daya negara dapat ditelusuri kontribusinya terhadap pencapaian tujuan organisasi.

Penerapan akuntabilitas kinerja diwujudkan melalui instrumen perencanaan dan pelaporan. Maka dari itu Kecamatan Wotu selaku Instansi Pemerintah yang melayani Masyarakat Melakukan Akuntabilitas dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur. Dengan demikian, akuntabilitas kinerja tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga sarana untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Laporan kinerja instansi pemerintah Kecamatan Wotu Triwulan III memberi gambaran penilaian mengenai tingkat pencapaian target masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen renstra tahun 2021-2026. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing. Sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator sasaran yang telah dicapai pada Tahun 2025.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan kegiatan sesuai dengan sasaran strategis dan tujuan yang ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Pengukuran capaian kinerja dilaksanakan berdasarkan indikator kinerja utama (IKU) yang telah ditetapkan Kecamatan Wotu. Setiap indikator mencerminkan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian sasaran strategis perangkat daerah. Data capaian

diperoleh dari laporan kinerja, hasil monitoring dan evaluasi, serta sumber data pendukung lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Melalui pengukuran capaian kinerja ini, Kecamatan Wotu dapat menilai tingkat pencapaian sasaran strategis, sebagai dasar dalam pengambilan keputusan, perbaikan kinerja di masa mendatang, serta peningkatan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik.

Tingkat capaian Kinerja Kecamatan Wotu di peroleh dengan membandingkan antara Target Kinerja dengan Realisasi Kinerja. Tingkat Akuntabilitas Kinerja Instansi di ukur dari setiap Komponen yang ada dengan Kategori Sebagai Berikut:

Tabel 3.1 Tingkat Akuntabilitas Kinerja

No	Nilai Angka	Predikat	Keterangan
1	>90	AA	Sangat Memuaskan – kinerja melampaui target, efektif, efisien, dan inovatif
2	>80-90	A	Memuaskan – kinerja mencapai target dengan efektivitas dan efisiensi baik
3	>70-80	BB	Baik – sebagian besar target tercapai, masih ada ruang perbaikan
4	>50-60	B	Cukup – target tercapai secara minimal, efektivitas dan efisiensi terbatas
5	>30-50	C	Kurang – sebagian besar target tidak tercapai, kinerja belum optimal
6	0-30	D	Sangat Kurang – kinerja jauh di bawah target, tidak efektif dan tidak efisien

Selanjutnya, hasil pengukuran capaian kinerja disajikan dalam bentuk tabel perbandingan antara target dan realisasi, yang kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi tingkat keberhasilan pelaksanaan program serta faktor-faktor yang mempengaruhinya, baik faktor pendukung maupun hambatan. Adapun capaian kinerja Kecamatan Wotu Pada Triwulan III Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja Triwulan II Tahun 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI TW III TAHUN 2025	CAPAIAN (%)	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Kemampuan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85	83,47	95,67	Belum Mencapai Target
2	Meningkatnya Capaian Kinerja Dan Keuangan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Wotu	Nilai LAKIP Kecamatan Wotu	83	61,10	74,61	Belum Mencapai Target

Sumber:Kecamatan Wotu, data diolah tahun 2025

3.2 . Analisis Capaian Kinerja

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap pelaksanaan program dan kegiatan hingga Triwulan III Tahun 2025, selanjutnya dilakukan analisis terhadap capaian kinerja Kecamatan Wotu. Analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai tingkat keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan yang telah ditetapkan, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja tersebut.

Melalui analisis capaian kinerja ini, diharapkan dapat diketahui sejauh mana efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Wotu dalam mendukung pencapaian sasaran strategis perangkat daerah. Hasil analisis ini juga menjadi dasar dalam merumuskan langkah-langkah perbaikan dan peningkatan kinerja pada triwulan berikutnya, guna memastikan target kinerja tahunan dapat tercapai secara optimal.

3.2.1. Capaian Sasaran Strategis I

“Meningkatnya Kemampuan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Kecamatan Wotu”

Sasaran ini merupakan salah satu upaya dalam mencapai misi ke-4 Kabupaten Luwu Timur sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD 2021-2026 yaitu “**Menciptakan Kepemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik**” dengan Sasaran “**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik**”. Sasaran ini didukung oleh kantor kecamatan Wotu Sebagai *Leading Sector* pada instansi pelayanan publik di tingkat kecamatan.

Adapaun Indikator yang digunakan untuk melihat pencapaian Sasaran Strategis I Kecamatan Wotu ini adalah **Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**. Pengukuran penilaian IKM diperoleh melalui kuesioner yang dibagikan kepada masyarakat yang mengajukan permohonan layanan pada loket yang tersedia di Kantor Kecamatan Wotu. Kemudian hasil dari responden ini diproses menggunakan Formula sebagai berikut:

$$IKP = \frac{\text{Total Nilai Persepsi Per Parameter}}{\text{Total Parameter yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

$$IKM = \text{Total Seluruh IKP} \times 25$$

Dimana:

$$\text{Nilai Penimbang} = \frac{1}{\text{jumlah Parameter}}$$

1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Triwulan III Tahun 2025

Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dilaksanakan melalui penyebaran kuesioner kepada masyarakat sebagai penerima layanan di Kantor Kecamatan Wotu. Instrumen kuesioner ini berfungsi sebagai alat ukur untuk menilai tingkat keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik, sekaligus menjadi umpan balik (*feedback*) terhadap kualitas pelayanan yang diberikan. Berdasarkan hasil pengumpulan data dari 147 responden, diperoleh gambaran mengenai persepsi masyarakat terhadap kinerja pelayanan di Kecamatan Wotu sebagaimana diuraikan pada data berikut.

Tabel 3.2 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Triwulan II Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi TW III 2025	Capaian (%)
1	Meningkatnya Kemampuan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Kecamatan Wotu	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85	83,47	98,2%

Sumber: Kecamatan Wotu, data diolah tahun 2025

Berdasarkan tabel 3.2, Target yang ditetapkan di tahun 2025 yaitu sebesar 85 dan terealisasi pada Triwulan III Senilai 83,47 dengan tingkat persentase 98,2% dari target yang direncanakan. Realisasi ini termasuk Predikat A (Memuaskan).

2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dan beberapa Tahun Terakhir

Adapun perbandingan antara target dan realisasi dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.3 Perbandingan Target dan Realisasi dengan Tahun-tahun sebelumnya.

No	Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	2022	78	90,65	116,22%
		2023	80	78,25	97,81%
		2024	82	78,6	95,85%
		2025	85	83,47	98,2%

Sumber: Kecamatan Wotu, data diolah tahun 2025

Berdasarkan Tabel 3.3 di atas, dapat dilihat bahwa Pada tahun 2022 Realisasi capaian Nilai IKM itu sebesar 90,65 dan pada tahun 2023-2024 Mengalami penurunan yang cukup signifikan hingga Angka 78, hal ini dikarenakan adanya penyesuaian dan Rasionalisasi Metode Perhitungan Nilai IKM. Namun Pada Triwulan III Tahun 2025 Kecamatan Wotu sudah berhasil meningkatkan Kinerja Pelayanannya hingga di Peroleh Nilai IKM Sebesar 83.47 meskipun belum sepenuhnya mencapai Target. Oleh karena itu

kecamatan Wotu akan terus melakukan Evaluasi dan Perbaikan hingga bisa melampaui target yang ditetapkan.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan III Tahun 2025 Dengan Target Jangka Menengah Dalam RENSTRA.

Perbandingan Realisasi kinerja sampai dengan Triwulan III tahun 2025 terhadap Target jangka menengah RENSTRA Kantor Kecamatan Wotu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5 Perbandingan capaian kinerja Triwulan III Tahun 2025 dengan target akhir RENSTRA Kantor Kecamatan Wotu 2021-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi TW II 2025	Target Akhir Periode RENSTRA
1	Meningkatnya Kemampuan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Kecamatan Wotu	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85	83,47	85

Sumber: Kecamatan Wotu, data diolah tahun 2025

Berdasarkan Tabel di atas, diperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat yang terealisasi pada Triwulan III Tahun 2025 adalah **83,47** dengan Predikat **“Memuaskan”**. Target Nilai IKM Pada akhir Periode Renstra 2021-2026 adalah 85. Jika Nilai IKM Triwulan III tahun 2025 dibandingkan dengan Target akhir Renstra, maka Persentase capaiannya sebesar 98.2%. Realisasi ini sudah sangat menghampiri target. Untuk itu diharapkan upaya yang lebih maksimal dari Aparat Kantor Kecamatan Wotu untuk meningkatkan semua potensi yang mendukung tercapainya target indikator tersebut.

Dalam meningkatkan kualitas pelayanan, diprioritaskan pada unsur yang mempunyai nilai terendah sedangkan unsur yang mempunyai nilai cukup tinggi harus tetap dipertahankan. Berdasarkan hasil tersebut maka diambil kesimpulan bahwa diperlukan peningkatan SDM petugas pelayanan melalui bimtek, Menyiapkan sarana dan prasarana, Membuat spanduk/papan informasi terkait syarat dan ketentuan pengurusan baik perizinan maupun non perizinan.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan.

a. Faktor penyebab keberhasilan

- 1) **Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik**, Pelaksanaan pelayanan administrasi pemerintahan dan layanan masyarakat telah menunjukkan peningkatan dari aspek kecepatan, kejelasan prosedur, serta sikap petugas. Upaya perbaikan terhadap budaya kerja aparatur turut berdampak pada peningkatan persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan.
- 2) **Pemanfaatan Teknologi Informasi**, Walaupun belum optimal, penggunaan sarana teknologi informasi dalam mendukung proses pelayanan telah memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi, sehingga mengurangi potensi ketidakpahaman dan meningkatkan efisiensi proses pelayanan.
- 3) **Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan**, Perbaikan sarana ruang pelayanan, ruang tunggu, dan ketersediaan fasilitas pendukung lainnya telah meningkatkan kenyamanan masyarakat selama proses pelayanan berlangsung.
- 4) **Komitmen Aparatur Terhadap Pelayanan**, Kedisiplinan, tanggung jawab, serta etika pelayanan yang terus dijaga oleh aparatur menjadi faktor penting yang meningkatkan tingkat kepuasan masyarakat.

b. Faktor Penyebab Kegagalan

- 1) **Beban Layanan yang Meningkat**, Pertumbuhan kebutuhan administrasi masyarakat menyebabkan peningkatan volume pekerjaan, sementara jumlah SDM tidak bertambah. Kondisi ini berpengaruh terhadap waktu pelayanan, terutama pada jam-jam pelayanan puncak.
- 2) **Belum Optimalnya Implementasi Layanan Digital**, Sebagian proses administrasi masih dilakukan secara manual. Ketidaksiapan sebagian masyarakat dalam memanfaatkan layanan berbasis digital menjadi kendala tersendiri, sehingga proses pelayanan masih bergantung pada layanan tatap muka.
- 3) **Variasi Kualitas Pelayanan Antar Petugas**, Standar pelayanan antar petugas belum sepenuhnya seragam. Perbedaan kemampuan

komunikasi, pemahaman SOP, dan kecepatan kerja berpengaruh pada persepsi masyarakat terhadap konsistensi mutu pelayanan.

- 4) **Minimnya Sosialisasi Informasi Pelayanan**, Distribusi informasi terkait persyaratan, alur layanan, dan estimasi waktu penyelesaian belum sepenuhnya merata kepada masyarakat. Hal ini berdampak pada terjadinya kesalahan administrasi atau pengulangan proses berkas yang memengaruhi kepuasan.

c. Alternatif Solusi yang telah dilakukan

- 1) **Optimalisasi Layanan Berbasis Digital**, Mengembangkan sistem layanan administrasi secara online, termasuk antrian digital, informasi layanan elektronik, serta sistem pengaduan berbasis daring yang mudah diakses masyarakat.
- 2) **Peningkatan Kompetensi Aparatur**, Melaksanakan pelatihan pelayanan prima, pembekalan SOP, serta penguatan budaya kerja ASN BerAKHLAK agar seluruh aparatur dapat memberikan pelayanan yang lebih responsif, cepat, dan komunikatif.
- 3) **Perbaikan dan Penataan Proses Pelayanan**, Melakukan evaluasi terhadap prosedur pelayanan dengan menghilangkan langkah-langkah yang tidak efektif. Penetapan standar waktu penyelesaian yang lebih jelas dan terukur juga diperlukan untuk memberikan kepastian kepada masyarakat.
- 4) **Penguatan Sarana dan Prasarana Pelayanan**, Melengkapi fasilitas layanan seperti ruang tunggu yang lebih nyaman, penyediaan papan informasi layanan, serta perbaikan fasilitas antrian untuk mendukung kenyamanan pengguna layanan.
- 5) **Penguatan Mekanisme Survei dan Pengaduan Masyarakat**, Melaksanakan survei IKM secara berkala serta menyediakan kanal pengaduan yang responsif untuk mengidentifikasi permasalahan secara cepat dan tepat.
- 6) Menggunakan standar operasional prosedur yang ada namun tetap memperhatikan dan mempertimbangkan sasaran Kantor Kecamatan Wotu.

5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber daya

Program dan Kegiatan serta sub kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran 1 (Meningkatnya kemampuan pelayanan publik penyelenggaraan urusan pemerintahan) terdiri dari 5 program, 6 Kegiatan, dan 9 Subkegiatan. Dengan alokasi anggaran sampai dengan Triwulan III sebesar Rp. 90.091.900 dengan realisasi sebesar Rp 76.031.950 sehingga persentase realisasi anggaran sebesar 84,39%.

Tabel 3.6 Pencapaian Kinerja dan Anggaran s.d Triwulan III 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi Anggaran s.d Triwulan III 2025	Realisasi s.d Triwulan III 2025	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
MENINGKATNYA KEMPAMPUAN PELAYANAN PUBLIK PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85	83,47	98,2%	Rp. 90.091.900	Rp.76.031.950	84,39%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berjalan sesuai standar (%)	100%	75%	75%	Rp. 5.619.500	Rp.2.720.000	48,40%
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase capaian kinerja pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum	100%	87,5%	87,5%	Rp.50.231.750	Rp.48.000.950	95,56%

	yang berjalan sesuai standar (%)						
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	100%	75%	75%	Rp. 9.175.000	Rp. 5.606.000	61,10
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase capaian kinerja pelayanan Ketenteraman dan ketertiban umum yang berjalan sesuai standar (%)	100%	75%	75%	Rp.21.256.000	Rp.18.290.000	86,05
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	persentase capaian kinerja pelayanan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang berjalan sesuai standar (%)	100%	0%	0%	Rp.3.809.650	Rp.1.415.000	37,14

Sumber:Kecamatan Wotu, Data diolah tahun 2025

Pencapaian Sasaran Strategis Meningkatkan kemampuan pelayanan publik penyelenggaraan urusan pemerintahan Kecamatan Wotu sebesar 98,2% dengan Penyerapan anggaran sebesar 84,39%, **sehingga persentase efesiensi biaya adalah 15,60%** . Persentase Efesiensi ini dihitung dengan rumus:

$$\text{Persentase Efesiensi Biaya} = 100\% - \left(\frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Target Biaua}} \times 100\% \right)$$

6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dilaksanakan untuk mendukung efektivitas tugas Camat dalam menjalankan kewenangan yang dilimpahkan. Pelaksanaan kegiatan ini didukung oleh **Subkegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan**, yang meliputi tiga bidang utama. Pertama, **pengelolaan layanan PPID Kecamatan**, yang memastikan tersedianya informasi publik secara transparan melalui pengelolaan Daftar Informasi Publik, pelayanan permohonan informasi, dan penyampaian laporan PPID kepada PPID Utama. Kedua, **pelayanan administrasi pemerintahan**, yang mencakup penerbitan berbagai surat keterangan, verifikasi dokumen pelayanan, serta fasilitasi administrasi kepada masyarakat dan pemerintah desa/kelurahan. Ketiga, **monitoring dan evaluasi retribusi desa**, yang dilakukan untuk memastikan tertib administrasi, ketepatan pelaporan, serta peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan retribusi di desa.

Sasaran dari Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik adalah meningkatnya capaian kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan publik di tingkat kecamatan. Ukuran keberhasilan program ini ditunjukkan melalui **indikator kinerja**, yaitu ***persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik***, dengan target kinerja sebesar **100%** pada tahun berjalan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja hingga Triwulan III Tahun 2025, capaian yang diperoleh baru mencapai **75%** dari target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar kegiatan dalam program ini masih berada pada tahap pelaksanaan tahun berjalan, sehingga hasil capaian belum sepenuhnya terealisasi.

Adapun formulasi perhitungan capaian kinerja program ini dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja yang dicapai pada

periode pelaporan dengan target kinerja yang telah direncanakan, yang dinyatakan dalam bentuk persentase menggunakan rumus:

$$\begin{aligned}\text{Capaian Kinerja}(\%) &= \left(\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \right) \times 100\% \\ &= \left(\frac{75}{100} \right) \times 100\% \\ &= 75\%\end{aligned}$$

Pada tahun 2025 Pencapaian Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dilaksanakan melalui 1 kegiatan dan 1 subkegiatan, adapun capaian kinerja Kegiatan/Subkegiatan pada Triwulan III Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.7 berikut ini:

Tabel 3.7 Pencapaian Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi s.d TW II	Capaian
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		100%	75%	750%
2.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat	Terlaksananya Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat	Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat yang dilaksanakan	100	75%	75%
2.1.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Lap	9 Lap	75%

Sumber: Kecamatan Wotu, data diolah tahun 2025

Dokumentasi Kegiatan Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik



Pelayanan Publik di Kecamatan Wotu (Yang terdiri dari Pengurusan dan penandatanganan Surat Keterangan Pindah, KTP, Akta Kematian, Akta Kelahiran dan Akta Nikah)



Monitoring dan Evaluasi Hasil PBB di Desa-Desa Kecamatan Wotu

b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

dilaksanakan untuk memperkuat peran masyarakat dalam proses pembangunan desa. Melalui Subkegiatan *Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa*, kecamatan mendorong keterlibatan aktif warga dan lembaga kemasyarakatan desa dalam penyusunan rencana pembangunan, termasuk fasilitasi musrenbang desa dan pendampingan dalam merumuskan usulan prioritas.

Sementara itu, Subkegiatan *Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan* lebih banyak diwujudkan melalui pembinaan dan dukungan terhadap kegiatan PKK di desa-desa. Kegiatan mencakup koordinasi, monitoring pelaksanaan program PKK, fasilitasi gerakan pemberdayaan keluarga, serta penguatan kapasitas kader agar kegiatan pemberdayaan berjalan efektif dan memberi dampak nyata bagi masyarakat.

Secara keseluruhan, program ini berfokus pada peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat desa melalui sinergi antara pemerintah kecamatan, desa, dan organisasi kemasyarakatan seperti PKK. Sasaran dari Program ini adalah Meningkatnya Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan. Hasil Pengukuran keberhasilan program ini dapat dilihat dari indikator kinerjanya yaitu : ***Persentase capaian kinerja pelayanan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang berjalan sesuai standar*** ,dengan target kinerja sebesar 100% tahun berjalan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja hingga Triwulan III Tahun 2025, capaian yang diperoleh baru mencapai **75%** dari target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar kegiatan dalam program ini masih berada pada tahap pelaksanaan tahun berjalan, sehingga hasil capaian belum sepenuhnya terealisasi.

Adapun formulasi perhitungan capaian kinerja program ini dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja yang dicapai pada

periode pelaporan dengan target kinerja yang telah direncanakan, yang dinyatakan dalam bentuk persentase menggunakan rumus:

$$\begin{aligned}\text{Capaian Kinerja}(\%) &= \left(\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \right) \times 100\% \\ &= \left(\frac{75}{100} \right) \times 100\% \\ &= 75\%\end{aligned}$$

Pada tahun 2025 Pencapaian Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dilaksanakan melalui 1 kegiatan dan 2 subkegiatan, adapun capaian kinerja Kegiatan/Subkegiatan pada Triwulan III Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.8 berikut ini:

Tabel 3.8 Pencapaian Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi s.d TW II	Capaian
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase capaian kinerja pelayanan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang berjalan sesuai standar	100%	75%	75%
3.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan	100	75%	75%
3.1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5 Lembaga	5 Lembaga	100%
3.1.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	6 Laporan	50%

Sumber: Kecamatan Wotu, data diolah tahun 2025

Dokumentasi Kegiatan Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan



Mendampingi Tim Penilai Lomba Desa Sehat Di Desa Cendana Hijau yang Mewakili Desa Sehat Tingkat Kabupaten Luwu Timur



Menghadiri Rapat Bulanan PKK Tingkat Kabupaten Luwu Timur



Menghadiri Kegiatan Pkk Mengaji Oleh Pokja I Tim Penggerak Pkk Kab. Luwu



Kegiatan Monitoring dan Pembinaan Dasa Wisma

c. Program Koordinasi dan Ketenteraman Ketertiban Umum

Program Koordinasi dan Ketenteraman Ketertiban Umum dilaksanakan untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan stabilitas wilayah kecamatan melalui kerja sama yang erat dengan berbagai unsur terkait. Kecamatan berperan mengoordinasikan upaya pengamanan wilayah bersama Kepolisian, TNI, dan instansi vertikal lainnya, termasuk dalam penanganan kriminalitas, potensi gangguan ketertiban, serta pengamanan kegiatan masyarakat yang membutuhkan dukungan aparat.

Di sisi sosial kemasyarakatan, kecamatan turut memfasilitasi hubungan yang harmonis antara tokoh agama, tokoh masyarakat, dan unsur kelembagaan desa guna mencegah dan menyelesaikan permasalahan sosial, seperti perselisihan warga dan sengketa lahan, serta menjaga stabilitas dan kerukunan di masyarakat. Kecamatan juga menjalin sinergi dengan perangkat daerah yang berwenang dalam penegakan peraturan daerah, termasuk Satpol PP, terutama dalam kegiatan penertiban, pengamanan acara, dan penanganan situasi yang berpotensi mengganggu ketenteraman umum.

Selain itu, program ini mencakup peran kecamatan dalam menangani kejadian bencana alam dan kebakaran. Kecamatan melakukan koordinasi cepat dengan BPBD, Damkar, dan instansi terkait untuk memastikan respons darurat berjalan efektif, termasuk pelaporan insiden, mobilisasi personel dan sumber daya, serta fasilitasi penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak. Secara keseluruhan, program ini bertujuan mewujudkan wilayah kecamatan yang aman, tertib, dan responsif terhadap berbagai isu keamanan maupun kedaruratan melalui sinergi kuat antarinstansi dan kolaborasi dengan masyarakat.

Sasaran dari Program Koordinasi dan Ketertiban Umum adalah Meningkatnya Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan. Ukuran keberhasilan program ini ditunjukkan melalui **indikator kinerja**, yaitu ***Persentase Rata-rata capaian kinerja pelayanan Ketenteraman dan ketertiban umum yang Berjalan Sesuai Standar***, dengan target kinerja sebesar **100%** pada tahun berjalan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja hingga Triwulan III Tahun 2025, capaian yang diperoleh baru mencapai **75%** dari target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar kegiatan dalam program ini masih berada pada tahap pelaksanaan tahun berjalan, sehingga hasil capaian belum sepenuhnya terealisasi.

Adapun formulasi perhitungan capaian kinerja program ini dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja yang dicapai pada periode pelaporan dengan target kinerja yang telah direncanakan, yang dinyatakan dalam bentuk persentase menggunakan rumus:

$$\begin{aligned} \text{Capaian Kinerja}(\%) &= \left(\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \right) \times 100\% \\ &= \left(\frac{75}{100} \right) \times 100\% \\ &= 75\% \end{aligned}$$

Pada tahun 2025 Pencapaian Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dilaksanakan melalui 2 kegiatan dan 3 subkegiatan, adapun capaian kinerja Kegiatan/Subkegiatan pada Triwulan III Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.9 berikut ini:

Tabel 3.9 Pencapaian Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi s.d TW II	Capaian
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Persentase capaian kinerja pelayanan Ketenteraman dan ketertiban umum yang berjalan sesuai standar	100%	75%	75%
4.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	100	75%	75%
4.1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Lap	3 Lap	75%

4.1.2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4 Lap	3 Lap	75%
4.2	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terlaksananya Koordinasi Penerapan Dan Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase pelaksanaan koordinasi penerapan penegakan Perda dan Perkada	100%	50%	75%
4.2.1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4 Lap	3 Lap	75%

Sumber: Kecamatan Wotu, data diolah tahun 2025

Dokumentasi Kegiatan Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik



Koordinasi/sinergitas dgn kepolisian dan tni terkait pembagaian bendera merah putih dlm menyambut hut ri ke 80



Sinergitas dgn TNI terkait mediasi tanah/lokasi sekolah dasar duloloe dan lampena



Sinergitas dengan perangkat daerah terkait peraturan perundang-undangan sekaligus rakor tentang pengaktifan siskamling utk mendukung kondusifitas di wiayah kec. Wotu

d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

dilaksanakan untuk memastikan kelancaran fungsi pemerintahan di tingkat kecamatan melalui koordinasi lintas sektor bersama unsur Forkopimcam. Program ini mencakup kegiatan pemantauan dan pengendalian kondisi wilayah, fasilitasi penyelesaian berbagai isu pemerintahan dan sosial kemasyarakatan, serta penguatan koordinasi antara kecamatan, Kepolisian, TNI, pemerintah desa, dan perangkat daerah terkait.

Dalam pelaksanaannya, kecamatan berperan mengkoordinasikan pertemuan rutin Forkopimcam untuk membahas situasi keamanan, ketertiban, dan perkembangan wilayah, termasuk langkah-langkah strategis dalam menjaga stabilitas pemerintahan, ketenteraman masyarakat, dan ketahanan wilayah. Kegiatan ini juga mencakup dukungan terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah di wilayah kecamatan, penanganan permasalahan lintas desa, serta monitoring terhadap implementasi program pemerintah di tingkat bawah.

Melalui sinergi yang kuat antara seluruh unsur Forkopimcam, program ini bertujuan memastikan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum berjalan efektif, responsif, dan mampu menghadapi dinamika sosial di masyarakat, sehingga tercipta kondisi wilayah yang stabil, tertib, dan kondusif bagi pembangunan.

Sasaran dari Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum adalah Meningkatnya Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum. Ukuran keberhasilan program ini ditunjukkan melalui **indikator kinerja**, yaitu ***Persentase capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum kecamatan yang berjalan sesuai standar***, dengan target kinerja sebesar **100%** pada tahun berjalan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja hingga Triwulan III Tahun 2025, capaian yang diperoleh baru mencapai 75% dari target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar kegiatan dalam program ini masih berada pada tahap pelaksanaan tahun berjalan, sehingga hasil capaian belum sepenuhnya terealisasi.

Adapun formulasi perhitungan capaian kinerja program ini dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja yang dicapai pada periode pelaporan dengan target kinerja yang telah direncanakan, yang dinyatakan dalam bentuk persentase menggunakan rumus:

$$\begin{aligned}\text{Capaian Kinerja}(\%) &= \left(\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \right) \times 100\% \\ &= \left(\frac{75}{100} \right) \times 100\% \\ &= 75\%\end{aligned}$$

Pada tahun 2025 Pencapaian Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dilaksanakan melalui 1 kegiatan dan 1 subkegiatan, adapun capaian kinerja Kegiatan/Subkegiatan pada Triwulan III Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.10 berikut ini:

Tabel 3.10 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi s.d TW II	Capaian
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum	Persentas capaian Kinerja Penyelenggaraa Pemerintahan Umum kecamatan yang berjalan sesuai standar	100%	75%	75%
5.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terselenggaranya Rekomendasi Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan	Persentase rekomendasi Forum koordinasi pimpinan kecamatan yang ditindaklanjuti	100	75%	75%
2.1.1	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Lap	9 Lap	75%

Sumber: Kecamatan Wotu, data diolah tahun 2025

Dokumentasi Kegiatan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum



Monitoring dan Evaluasi APBDES Kecamatan Wotu

e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa bertujuan memastikan penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan tertib, transparan, dan sesuai ketentuan. Melalui program ini, kecamatan melakukan monitoring terhadap penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBDes, termasuk penelaahan dokumen, evaluasi kegiatan, serta memastikan pengelolaan anggaran desa berjalan akuntabel dan tepat sasaran.

Program ini juga mencakup pengawasan atas pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus (BKK), mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan, hingga pelaporan realisasi fisik dan keuangan. Dalam prosesnya, kecamatan memberikan pembinaan administratif, pendampingan penyelesaian masalah, serta memastikan setiap kegiatan desa berjalan sesuai aturan.

Untuk memperkuat kualitas pembinaan, kecamatan melakukan koordinasi intensif dengan perangkat daerah terkait, baik dalam hal regulasi, teknis pelaksanaan, maupun penyelesaian permasalahan yang memerlukan dukungan lintas sektor. Dengan demikian, program ini mendorong peningkatan tata kelola pemerintahan desa secara konsisten dan terarah.

Sasaran dari Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa adalah Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi Dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa. Ukuran keberhasilan program ini ditunjukkan melalui **indikator kinerja**, yaitu ***Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerinthan Desa yang dilaksanakan***, dengan target kinerja sebesar **100%** pada tahun berjalan.

Berdasarkan hasil pengukuran hingga Triwulan III Tahun 2025, capaian program baru mencapai 25% dari target yang ditetapkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian kegiatan masih dalam proses pelaksanaan sehingga hasilnya belum sepenuhnya terealisasi. Penghitungan capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi terhadap target yang direncanakan, kemudian dinyatakan dalam persentase sesuai formulasi pengukuran kinerja yang berlaku.

$$\begin{aligned} \text{Capaian Kinerja}(\%) &= \left(\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \right) \times 100\% \\ &= \left(\frac{25}{100} \right) \times 100\% \\ &= 25\% \end{aligned}$$

Pada tahun 2025 Pencapaian Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dilaksanakan melalui 1 kegiatan dan 1 subkegiatan

, adapun capaian kinerja Kegiatan/Subkegiatan pada Triwulan III Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.11 berikut ini:

Tabel 3.11 Pencapaian Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi s.d TW II	Capaian
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	persentase capaian kinerja pelayanan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang berjalan sesuai standar	100%	25%	25%
6.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi,Rekomendasi Dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan	100	25%	25%
6.1.1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	34 Lap	17 Lap	50%
6.1.2	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	17 Lap	0	0%

Sumber: Kecamatan Wotu, data diolah tahun 2025

Dokumentasi Kegiatan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

RKPDES 2026 Kecamatan Wotu

KESIMPULAN

- Capaian kinerja pada sasaran **“Meningkatnya capaian kinerja dan keuangan penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan Wotu”** sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 menunjukkan hasil sebesar **98,2%**, yang diperoleh berdasarkan hasil perhitungan menggunakan formulasi indikator kinerja yaitu:

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian Kinerja} &= \frac{\text{Realisasi Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100 \\
 &= \frac{98,2}{100} \times 100 \\
 &= 98,2\%
 \end{aligned}$$

- Dalam mencapai sasaran kinerja, Kecamatan Wotu didukung oleh **alokasi anggaran** yang telah direncanakan dalam **DPA-SKPD Kecamatan Wotu** hingga **Triwulan III Tahun Anggaran 2025** sebesar **Rp. 90.091.900,-**, dengan **realisasi keuangan** yang telah terserap sebesar **Rp. 76.031.950,-** atau **84,39%** dari total anggaran yang dialokasikan.

3.2.2. Capaian Sasaran Strategis II

“Meningkatnya capaian kinerja dan keuangan penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan Wotu”

Sasaran strategis ini merupakan salah satu upaya mencapai misi ke-4 sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2021-2026 yaitu “Menciptakan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang lebih baik”, dan tujuan “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik”. Sasaran ke-2 ini didukung oleh Kantor Kecamatan Wotu yang berkaitan dengan pelaksanaan tata kelola pemerintahan lingkup Kecamatan. Untuk mengukur capaian sasaran ini, terdapat 1 (Satu) **indikator kinerja** yaitu **Nilai AKIP Kecamatan Wotu** dengan analisis pencapaian sebagai berikut :

1. Perbandingan Target dan Triwulan III Pada tahun 2025

Formulasi indikator yang digunakan dalam pengukuran capaian target adalah **“Nilai AKIP berdasarkan LHE Inspektorat”**. Target indikator kinerja pada Tahun 2025 ditetapkan sebesar **82 (kategori A)**. Namun, nilai tersebut belum dapat dibandingkan dengan realisasi akhir Tahun 2025 karena proses penilaian AKIP dilaksanakan pada awal tahun 2026. Oleh karena itu, perbandingan dilakukan menggunakan **realisasi Nilai AKIP Triwulan I Tahun 2025**.

Berdasarkan hasil evaluasi Inspektorat pada **Triwulan I Tahun 2025**, diperoleh nilai **61,10 (kategori BB)**. Hasil ini menunjukkan bahwa capaian kinerja belum memenuhi target yang telah ditetapkan.

Tabel 3.12 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Triwulan II Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi TW II 2025	Capaian (%)
1	Meningkatnya capaian kinerja dan keuangan penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan Wotu	Nilai AKIP Kecamatan Wotu	82	61,10	74,51%

Sumber: Kecamatan Wotu, data diolah tahun 2025

2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dan beberapa Tahun Terakhir

Adapun perbandingan antara target dan realisasi dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.13 Perbandingan Target dan Realisasi dengan Tahun-tahun sebelumnya.

No	Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
1	Nilai AKIP Kecamatan Wotu	2022	73	63,24	86,63
		2023	77	64,20	83,37
		2024	81	75	92,59
		2025	82	61,10	74,51

Sumber: Kecamatan Wotu, data diolah tahun 2025

Berdasarkan **Tabel** di atas, dapat dijelaskan bahwa capaian **Nilai AKIP Kecamatan Wotu** mengalami fluktuasi dalam empat tahun terakhir. Pada **Tahun 2022**, target yang ditetapkan sebesar **73**, dengan realisasi **63,24**, sehingga capaian kinerjanya mencapai **86,63%**. Kinerja meningkat pada **Tahun 2023**, meskipun realisasi hanya **64,20** dari target **77**, capaian kinerja tercatat **83,37%**. Selanjutnya pada **Tahun 2024**, terjadi peningkatan yang cukup signifikan, di mana realisasi mencapai **75** dari target **81**, dengan capaian kinerja sebesar **92,59%**, menunjukkan perbaikan yang lebih optimal dibandingkan dua tahun sebelumnya. Namun pada **Tahun 2025**, meskipun target dinaikkan menjadi **82**, realisasi sementara baru mencapai **61,10**, sehingga capaian kinerja baru berada di angka **74,51%**.

Nilai capaian tahun 2025 tersebut masih bersifat sementara karena proses penilaian AKIP oleh Inspektorat belum dilakukan secara menyeluruh dan baru berdasarkan hasil **LHE Inspektorat Triwulan I Tahun 2025**. Namun demikian, tren peningkatan target setiap tahunnya menunjukkan adanya **komitmen Kecamatan Wotu untuk terus memperbaiki kualitas akuntabilitas kinerja**, sehingga diharapkan nilai AKIP Tahun 2025 dapat meningkat setelah dilakukan penilaian secara penuh oleh Inspektorat pada tahun berikutnya.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan III Tahun 2025 Dengan Target Jangka Menengah Dalam RENSTRA.

Perbandingan Realisasi kinerja sampai dengan Triwulan III tahun 2025 terhadap Target jangka menengah RENSTRA Kantor Kecamatan Wotu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.14 Perbandingan capaian kinerja Triwulan III Tahun 2025 dengan target akhir RENSTRA Kantor Kecamatan Wotu 2021-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi TW II 2025	Target Akhir Periode RENSTRA
1	Meningkatnya capaian kinerja dan keuangan penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan Wotu	Nilai AKIP Kecamatan Wotu	82	61,10	82

Sumber: Kecamatan Wotu, data diolah tahun 2025

Berdasarkan tabel tersebut, capaian kinerja sampai dengan **Triwulan III Tahun 2025** menunjukkan nilai **61,10 (BB)**, yang berarti **belum mencapai target jangka menengah**. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain masih terdapat **ASN yang belum melakukan penginputan SKP, Dokumen Pelaporan Kinerja yang masih banyak butuh perbaikan**, serta rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya yang belum sepenuhnya ditindaklanjuti. Nilai tersebut masih merupakan hasil penilaian sementara (triwulanan) dan dapat mengalami perubahan setelah pelaksanaan penilaian AKIP tahunan oleh Tim Evaluator Inspektorat pada awal tahun berikutnya.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan.

a. Faktor penyebab keberhasilan

- 1) **Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan**, Dokumen perencanaan seperti Renja, PK, serta dokumen pelaporan seperti Laporan Triwulan telah tersusun tepat waktu sehingga memenuhi sebagian unsur penilaian akuntabilitas kinerja.
- 2) **Komitmen Internal Aparatur**, Adanya komitmen pimpinan dan

aparatur untuk memperbaiki administrasi kinerja telah mendorong terlaksananya beberapa program penguatan pengendalian internal, meskipun belum optimal

- 3) **Adanya upaya perbaikan melalui evaluasi internal**, meskipun belum optimal, menunjukkan adanya kesadaran akan pentingnya peningkatan kualitas kinerja organisasi.

b. Faktor Kegagalan / Penurunan Kinerja

- 1) **Kinerja Output dan Outcome Belum Terdokumentasi Secara Lengkap**, Pelaksanaan kegiatan pada semester awal belum menghasilkan data kinerja yang lengkap sehingga beberapa indikator belum dapat dinilai secara optimal. Kekurangan bukti dukung (evidence) menyebabkan turunnya nilai pada aspek pengukuran kinerja
- 2) **Pengukuran dan Pengendalian Kinerja** Belum Sistematis Pemantauan capaian indikator oleh masing-masing penanggung jawab kegiatan belum berjalan sesuai interval, menyebabkan ketidakteraturan data serta lemahnya pengendalian atas kegiatan yang tidak mencapai target.
- 3) **Minimnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pengelolaan Kinerja**, Penyimpanan data kinerja dan bukti dukung masih dilakukan secara manual, sehingga proses penelusuran, konsolidasi, dan penyajian data membutuhkan waktu dan rawan ketidaktepatan.
- 4) **Kapasitas SDM SAKIP Masih Perlu Ditingkatkan**, Sebagian aparatur belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai metode penyusunan indikator, perhitungan kinerja, serta penyusunan laporan evaluasi. Dampaknya terlihat pada kualitas narasi, konsistensi data, dan ketepatan indikator.

c. Alternatif Solusi / Tindak Lanjut

- 1) **Peningkatan Kapasitas ASN**: Melaksanakan bimbingan teknis penyusunan perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja agar seluruh pegawai memahami indikator, target, dan rencana aksi.

- 2) **Penguatan Evaluasi Internal:** Melaksanakan rekomendasi perbaikan dari Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja untuk peningkatan akuntabilitas kinerja.
- 3) **Peningkatan Keterlibatan Pimpinan:** Menetapkan jadwal rapat kinerja secara berkala dengan notulen dan bukti dukung untuk memastikan pengendalian kinerja berjalan efektif.
- 4) **Perbaikan Dokumen Pelaporan:** Menyusun laporan yang lebih informatif, memuat analisis capaian, kendala, dan rekomendasi perbaikan secara lengkap serta mempublikasikannya melalui Website PPID.

5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber daya

Program dan Kegiatan serta sub kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran 2 (Meningkatnya capaian kinerja dan keuangan penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan Wotu) terdiri dari 1 program, 8 Kegiatan, dan 23 Subkegiatan. Dengan alokasi anggaran sampai dengan Triwulan III sebesar Rp. 1.838.422.444 dengan realisasi sebesar Rp 1.310.562.688 sehingga persentase realisasi anggaran sebesar 71,28%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan telah berjalan cukup baik, namun masih terdapat kesenjangan antara target dan realisasi yang perlu menjadi perhatian dalam evaluasi kinerja triwulan berikutnya

Tabel 3.15 Pencapaian Kinerja dan Anggaran s.d Triwulan III 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi Anggaran s.d Triwulan III 2025	Realisasi s.d Triwulan III 2025	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
MENINGKATNYA CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN KECAMATAN WOTU	Nilai AKIP Kecamatan Wotu	82	61,1	74,51%	Rp.2.404.803.298	Rp.1.966.706.120	81,78%

Sumber : Kecamatan Wotu, data diolah tahun 2025

Pada Triwulan III 2025 Capaian kinerja sebesar **74,51%** dan realisasi anggaran mencapai **81,78%** menunjukkan bahwa tingkat penyerapan anggaran sudah tinggi, namun belum sepenuhnya sejalan dengan capaian output kinerja. Kondisi ini mengindikasikan bahwa sebagian anggaran telah digunakan untuk mendukung kegiatan, tetapi output yang dihasilkan belum seluruhnya mencapai target yang direncanakan.

Pernyerapan anggaran yang lebih tinggi di TW III dikarenakan adanya Belanja Pengadaan peralatan dan Mesin lainnya, berupa Printer dan Proyektor, dan beberapa kegiatan telah terealisasi secara keuangan, tetapi capaiannya belum terdokumentasi secara lengkap sehingga belum tercermin dalam nilai kinerja.

Persentase efisiensi biaya dapat dihitung dari selisih antara alokasi anggaran dan realisasi anggaran terhadap capaian kinerja, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase Efisiensi Biaya} = 100\% - \left(\frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Target Biaya}} \times 100\% \right)$$

Berdasarkan data yang ada, diperoleh **tingkat efisiensi biaya sebesar 18,22%**, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan masih mampu menghasilkan capaian kinerja yang tinggi dengan penggunaan anggaran yang relatif hemat.

Dengan realisasi anggaran sebesar **81,78%**, capaian kinerja Kecamatan Wotu pada Triwulan III Tahun 2025 baru mencapai **74,51%**. Kondisi ini menunjukkan bahwa penggunaan anggaran **belum sepenuhnya efisien**, karena peningkatan belanja tidak diikuti oleh capaian kinerja yang sebanding. Hal ini mengindikasikan bahwa masih terdapat ruang perbaikan dalam pengelolaan kegiatan agar setiap alokasi anggaran dapat menghasilkan output kinerja yang lebih optimal

6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Dalam Pencapaian sasaran Strategis II (Meningkatnya capaian kinerja dan keuangan penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan Wotu) didukung oleh satu Program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota. Indikator Program ini adalah *Persentase Kegiatan*

penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar dengan Formulasi jumlah capaian kinerja seluruh kegiatan dibagi jumlah seluruh kegiatan.

Berdasarkan data capaian kinerja pada Triwulan III, seluruh program, kegiatan, dan sub kegiatan menunjukkan progres yang **baik**, dengan tingkat capaian berada pada kisaran **75% hingga 100%**. Hal ini menggambarkan bahwa pelaksanaan sebagian besar kegiatan sudah mendekati bahkan mencapai target yang direncanakan untuk periode pelaporan.

Capaian tertinggi terdapat pada **kegiatan Pengadaan Peralatna dan Mesin**, yang telah mencapai **100%**. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa kegiatan mampu diselesaikan tepat waktu dan sesuai rencana.

Sementara itu, **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** menunjukkan capaian sebesar **82,53%**, yang berarti program ini telah **melampaui target kinerja Triwulan III**. Capaian ini mengindikasikan bahwa proses perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja, administrasi, serta penyusunan dokumen berjalan efektif dan berada pada jalur pencapaian target tahunan.

Secara keseluruhan, kinerja Triwulan III dapat dinyatakan **sangat baik**, karena seluruh rangkaian kegiatan berada dalam rentang capaian tinggi ($\geq 75\%$). Meskipun demikian, beberapa kegiatan yang belum mencapai 100% tetap memerlukan perhatian dan penyelesaian. Berikut Tabel Capaian Kinerja Triwulan III TA 2025.

**Tabel 3.16 Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemertihan Daerah
Kabupaten/Kota**

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2025	Target s.d TW III	Realisasi s.d TW III	Capaian
1	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota		Persentase Kegiatan penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100%	75%	82,53%	82,53%
1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terpenuhinya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi dengan baik	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu	100%	80%	80%	80%
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Perencanaan Yang disusun (Dokumen)	2 Dok	2 Dok	2 Dok	100%
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah dokumen RKA- SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2 Dok	1 Dok	1 Dok	50%
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		Jumlah dokumen DKA- SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DKA-SKPD (Dokumen)	2 Dok	1 Dok	1 Dok	100%
1.1.4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan evaluasi kinerja perangkat daerah (Laporan)	10 Lap	7 Lap	7 Lap	70%

1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik	100%	75%	75%	75%
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	19 Org/Bln	19 Org/Bln	19 Org/Bln	75%
1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/ semesteran SKPD dan Laporan koordinasi Penyusunan Laporan keuangan bulanan/triwulanan/ semesteran SKPD (Laporan)	12 Lap	9 Lap	9 Lap	75%
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	terlaksananya administrasi BMD yang diadministrasikan tepat waktu	Persentase Barang Milik Daerah yang Diadministrasikan sesuai standar	100%	75%	75%	75%
1.3.1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4 Lap	3 Lap	3 Lap	75%
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah dengan baik	Persentase Rara-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	78,5%	78,5%	87,5%
1.4.1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian (Dokumen)	12 Lap	9 Lap	9 Lap	75%

1.4.2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan (orang)	2 Org	2 Org	2 Org	100%
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	Persentase Rara-rata Capaian kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	70%	70%	75%
1.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (Paket)	9 Paket	7 Paket	7 Paket	77%
1.5.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan (Paket)	6 Paket	5 Paket	5 Paket	83%
1.5.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (Paket)	3 Paket	3 Paket	2 Paket	67%
1.5.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (Dokumen)	42 Dokumen	32 Dokumen	32 Dokumen	76,19%
1.5.5	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu (Laporan)	12 Lap	9 Lap	9 Lap	75%
1.5.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat kordinasi dan konsultasi SKPD (Laporan)	12 Lap	9 Lap	9 Lap	75%
1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	tersedianya BMD perangkat daerah	Persentase Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah penunjang yang terpenuhi	100%	100%	100%	100%
1.6.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang diadakan (Unit)	2 Unit	2	2	100%

1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	76,31%	76,31%	81,25%
1.7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat (Laporan)	12 Lap	9 Lap	9 Lap	75%
1.7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan (Laporan)	12 Lap	9 Lap	9 Lap	75%
1.7.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (Laporan)	2 Lap	2 Lap	2 Lap	100%
1.7.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan (Laporan)	12 Lap	9 Lap	9 Lap	75%
1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang milik daerah dengan baik	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	100%	79,31%	79,31%	86,49%
1.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya dan perizinannya (Unit)	6 Unit	5 Unit	5 Unit	83,3%
1.8.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit)	21 Unit	16 Unit	16 unit	76,19%
1.8.3	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)	2 Unit	2 Unit	2 unit	100%

Sumber: Kecamatan Wotu, data diolah tahun 2025

Secara umum, pelaksanaan **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** pada Triwulan III Tahun 2025 telah berjalan dengan baik, Capaian kinerja sebesar **77%** menunjukkan bahwa pelaksanaan program telah berlangsung cukup baik. Sementara itu, realisasi anggaran yang mencapai **67,93%** menunjukkan bahwa penggunaan anggaran masih lebih rendah dibandingkan capaian kinerjanya. Kondisi ini mencerminkan adanya indikasi efisiensi, namun tetap diperlukan penelaahan lebih lanjut untuk memastikan bahwa rendahnya serapan anggaran bukan disebabkan oleh penundaan pelaksanaan kegiatan maupun kendala administratif. Secara keseluruhan, hubungan kedua capaian tersebut menunjukkan bahwa program telah berjalan efektif dengan pemanfaatan anggaran yang relatif hemat.

Untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja, Kecamatan Wotu akan mempercepat proses pelaksanaan kegiatan, memperkuat koordinasi antar bidang, serta meningkatkan monitoring dan evaluasi agar seluruh sasaran program dapat tercapai secara maksimal pada akhir tahun anggaran.

KESIMPULAN

- Capaian kinerja pada sasaran “**Meningkatnya capaian kinerja dan keuangan penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan Wotu**” sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 menunjukkan hasil sebesar **74,51%**, yang diperoleh berdasarkan hasil perhitungan menggunakan formulasi indikator kinerja yaitu:

$$\begin{aligned} \text{Capaian Kinerja} &= \frac{\text{Realisasi Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100 \\ &= \frac{74,51}{100} \times 100 \\ &= 74,51\% \end{aligned}$$

- Dalam mencapai sasaran kinerja, Kecamatan Wotu didukung oleh **alokasi anggaran** yang telah direncanakan dalam **DPA-SKPD Kecamatan Wotu** hingga **Triwulan III Tahun Anggaran 2025** sebesar **Rp.2.404.803.298,-**, dengan **realisasi keuangan** yang telah terserap sebesar **Rp.1.966.706.120,-** atau **81,78%** dari total anggaran yang dialokasikan.

3.3. Realisasi Anggaran

Pada Tahun Anggaran 2025, Kecamatan Wotu memperoleh alokasi anggaran APBD sebesar Rp. 2.949.577.075 (Dua Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Tujuh Puluh Lima Rupiah). Anggaran tersebut terdiri dari belanja Operasi sebesar Rp. 2.932.577.075 dan belanja modal sebesar Rp. 17.000.000. Seluruh alokasi tersebut digunakan untuk mendukung pelaksanaan 6 program, 14 kegiatan, dan 32 sub kegiatan.

Berdasarkan realisasi anggaran Kecamatan Wotu sampai dengan Triwulan III Tahun 2025, serapan anggaran mencapai **69,26%** dari total pagu sebesar Rp 2.949.577.075. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan secara umum telah berjalan cukup baik, meskipun masih terdapat beberapa sub kegiatan yang memerlukan percepatan pada triwulan berikutnya.

Sub kegiatan dengan capaian tertinggi adalah Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya serta Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa, yang realisasinya telah melampaui **90%**. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan tersebut terencana dengan baik dan dapat dilaksanakan tepat waktu tanpa hambatan administrasi.

Sementara itu, capaian terendah terdapat pada Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan yang masih 0%, karena kegiatan baru dijadwalkan pada Triwulan IV dan menunggu PTO (Petunjuk Operasioanl) dari dinas terkait dan masih menunggu Pengajuan Monev dari Desa Desa di Kecamatan Wotu. Beberapa sub kegiatan lainnya juga masih rendah serapannya karena menunggu proses GU bendahara yang belum teradministrasi sebagai realisasi.

Secara keseluruhan, kinerja realisasi anggaran hingga Triwulan III masih berada dalam koridor yang direncanakan. Namun demikian, diperlukan percepatan penyelesaian kegiatan dan administrasi keuangan pada Triwulan IV agar target serapan anggaran akhir tahun dapat tercapai secara optimal..

Adapun target dan realisasi anggaran hingga Triwulan II Tahun Anggaran 2025 disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 3.17 Realisasi Anggaran Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Pada Triwulan III TA 2025

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran	Target s.d TW II		Realisasi Anggaran S.d		Selisih	Total Sisa Anggaran		Persentase Capaian Anggaran sampai 30 Juni Tahun 2025
			TA.2025 (Berdasarkan Anggaran KAS)		30 Juni 2025					
1	2	3	4	5	6	7		9	10	
				Rp	%	Rp		Rp	%	
	KECAMATAN WOTU	2.949.577.075						906.839.005		69,26
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.841.842.675	2.404.803.298	1.966.706.120	81,78	438.097.178	18,22	875.136.555	30,79	69,21
1.1	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	30.170.500	27.710.500	20.642.000	56,29	7.068.500	25,51	9.528.500	31,58	68,42
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14.025.000	11.775.000	10.400.000	88,32	1.375.000	11,68	3.625.000	25,85	74,15
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.554.950	3.344.950	1.000.000	29,90	2.344.950	70,10	2.554.950	71,87	28,13
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.724.850	2.724.850	1.210.000	44,41	1.514.850	55,59	1.514.850	55,59	44,41
1.1.4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.865.700	9.865.700	8.032.000	62,53	1.833.700	18,59	1.833.700	18,59	81,41
1.2	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	2.304.780.893	1.955.857.948	1.598.802.735	81,74	357.055.213	18,26	705.978.158	30,63	69,37
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.281.560.893	1.937.587.948	1.584.072.735	81,75	353.515.213	18,25	697.488.158	30,57	69,43
1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	23.220.000	18.270.000	14.730.000	80,62	3.540.000	19,38	8.490.000	36,56	63,44

	Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD									
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10.290.000	8.040.000	6.310.000	78,48	2.850.000	35,45	3.980.000	38,68	61,32
1.3.1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.290.000	8.040.000	6.310.000	78,48	1.730.000	21,52	3.980.000	38,68	61,32
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	18.739.850	12.239.850	5.454.000	44,56	6.785.850	55,44	13.285.850	70,90	29,10
1.4.1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3.071.850	3.071.850	1.520.000	49,48	1.551.850	50,52	1.551.850	50,52	49,48
1.4.2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	15.668.000	9.168.000	3.934.000	42,91	5.234.000	57,09	11.734.000	74,89	25,11
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	176.288.800	170.835.000	165.547.200	96,90	5.287.800	3,10	10.741.600	6,09	93,91
1.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.125.000	2.125.000	1.390.000	65,41	735.000	34,59	735.000	34,59	65,41
1.5.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.525.000	6.060.000	4.770.000	78,71	1.290.000	21,29	1.755.000	26,90	73,10
1.5.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.599.800	8.000.000	6.538.000	81,73	1.462.000	18,28	3.061.800	31,89	68,11
1.5.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.200.000	3.150.000	1.800.000	57,14	1.350.000	42,86	2.400.000	57,14	42,86
1.5.5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	112.500.000	112.500.000	112.100.000	99,64	400.000	0,36	400.000	0,36	99,64
1.5.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	41.339.000	39.000.000	38.949.200	99,87	50.800	0,13	2.389.800	5,78	94,22
1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	17.000.000	17.000.000	15.318.000	90,11	1.682.000	0,00	1.682.000	9,89	90,11
1.6.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.000.000	17.000.000	15.318.000	90,11	1.682.000	0,00	1.682.000	9,89	90,11
1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	247.407.632	176.500.000	132.663.835	75,16	43.836.165	24,84	114.743.797		53,62

1.7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.673.750	11.255.000	7.698.000	68,40	3.557.000	31,60	3.975.750	34,06	65,94
1.7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	37.748.882	34.000.000	23.060.835	67,83	10.939.165	32,17	14.688.047	38,91	61,09
1.7.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.025.000	5.025.000	5.025.000	100,00	-	0,00	-	0,00	100,00
1.7.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	192.960.000	126.220.000	96.880.000	76,75	29.340.000	23,25	96.080.000	49,79	50,21
1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	37.165.000	36.620.000	21.968.350	59,99	14.651.650	40,01	15.196.650	40,89	59,11
1.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	18.995.000	18.450.000	9.268.350	50,23	9.181.650	49,77	9.726.650	51,21	48,79
1.8.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.170.000	8.170.000	2.700.000	33,05	5.470.000	66,95	5.470.000	66,95	33,05
1.8.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.000.000	10.000.000	10.000.000	100,00	-	0,00	-	0,00	100,00
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6.019.500	5.619.500	2.720.000	48,40	2.899.500	51,60	3.299.500	54,81	45,19
2.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	6.019.500	5.619.500	2.720.000	48,40	2.899.500	51,60	3.299.500	54,81	45,19
2.1.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	6.019.500	5.619.500	2.720.000	48,40	2.899.500	51,60	3.299.500	54,81	45,19
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	62.231.750	50.231.750	48.000.950	95,56	2.230.800	4,44	14.230.800	22,87	77,13

3.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	62.231.750	50.231.750	48.000.950	95,73	2.230.800	4,44	14.230.800	22,87	77,13
3.1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	11.512.950	11.512.950	11.057.950	96,05	455.000	3,95	455.000	3,95	96,05
3.1.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	50.718.800	38.718.800	36.943.000	95,41	1.775.800	4,59	13.775.800	27,16	72,84
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	9.175.000	9.175.000	5.606.000	61,10	3.569.000	38,90	3.569.000	38,90	61,10
4.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentaman dan Ketertiban Umum	5.900.000	5.900.000	2.828.000	47,93	4.410.000	74,75	3.072.000	52,07	47,93
4.1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3.425.000	3.425.000	2.102.000	61,37	1.323.000	53,24	1.323.000	100,00	61,37
4.1.2	Harmonisasi hubungan antara tokoh agama dan tokoh masyarakat	2.475.000	2.475.000	726.000	29,33	1.749.000	132,02	1.749.000	100,00	29,33
4.2	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	3.275.000	3.275.000	2.778.000	84,82	497.000	15,18	497.000	15,18	84,82
4.2.1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	3.275.000	3.275.000	2.778.000	84,82	(1.453.200)	109,69	497.000	25,82	84,82

5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	25.248.500	21.256.000	18.290.000	86,05	2.966.000	13,95	6.958.500	27,56	72,44
5.1	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	25.248.500	21.256.000	18.290.000	86,05	2.966.000	13,95	6.958.500	27,56	72,44
5.1.1	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	25.248.500	21.256.000	18.290.000	86,05	2.966.000	14	6.958.500	27,56	72,44
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	5.059.650	3.809.650	1.415.000	37,14	2.394.650	62,86	3.644.650	72,03	27,97
6.1	<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	5.059.650	3.809.650	1.415.000	37,14	2.394.650	62,86	3.644.650	72,03	27,97
6.1.1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	3.134.850	2.484.850	1.415.000	56,95	1.069.850	43,05	1.719.850	54,86	45,14
6.1.2	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	1.924.800	1.324.800	-	0,00	1.324.800	100,00	1.924.800	100,00	0,00
	TOTAL	2.949.577.075	2.494.895.198	2.042.738.070	81,88	452.157.128	18,12	906.839.005	30,74	69,26

Sumber: Kecamatan Wotu, Data diolah tahun 2025

Tabel 3.18 Permasalahan Dan Solusi Terkait Penyerapan Anggaran Triwulan III Tahun Anggaran 2025

Permasalahan Terkait Pencapaian				
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja (Secara Teknis baik Faktor Internal maupun Faktor Eksternal)	Permasalahan Terkait Realisasi Keuangan	Solusi
	KECAMATAN WOTU			
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
1.1	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>			
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pada Sub Kegiatan ini Target Kinerja 2 Dokumen dan tercapai 100%	Realisasi Keuangan sub kegiatan ini pada TW III telah mencapai 61,89 % adapun sisa atau selisih anggaran terlihat masih begitu Besar karena target anggaran sudah menggunakan anggaran pada perubahan 2025	Sebagian SPJ akan di GU Kan pada TW IV karena pada TW III anggaran kas sudah tidak Mencukupi
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Pada Sub Kegiatan ini Target Kinerja 2 Dokumen dan sampai pada TW III tercapai 50%	Pada Sub Kegiatan ini terdapat Sisa atau Selisih sebesar 71,73% dimana pada Sub Kegiatan ini Belanja Perjalanan Dinas dianggarkan sebesar 60% dan pada kegiatan ini Pengangannya pada TW III dan IV	Untuk Sub Kegiatan ini telah dianggarkan seperti tahun-tahun sebelumnya dan masih menunggu kegiatan selanjutnya Pada TW IV
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Pada Sub Kegiatan ini Target Kinerja 2 Dokumen dan sampai pada TW III tercapai 50%	Pada Sub Kegiatan ini terdapat Sisa atau Selisih sebesar 55,59% dimana pada Sub Kegiatan ini Belanja Perjalanan Dinas	Untuk Sub Kegiatan ini telah dianggarkan seperti tahun-tahun sebelumnya dan masih menunggu kegiatan selanjutnya Pada TW IV

			dianggarkan sebesar 60% dan pada kegiatan ini Penggarannya pada TW III dan IV	
1.1.4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Target Kinerja telah tercapai dari 10 Dokumen dan terealisasi 70%	Pada Sub Kegiatan Realisasi Keuangan mencapai 62,53 % dan adapun sisa anggaran pada sub Kegiatan ini dikarenakan penempatan anggaran kasnya pada TW IV serta adanya penambahan anggaran pada Perubahan 2025	Pada Sub Kegiatan ini telah dilakukan penambahan belanja pada Anggaran Perubahan dikarenakan belanja perjalanan Dinas untuk kegiatan evaluasi sudah tidak mencukupi
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Indikator kinerja pada Sub kegiatan adalah Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan. Target kinerjanya tercapai sesuai target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen DPA SKPD Kecamatan Wotu dengan target kinerja Triwulan I -Triwulan III adalah 19 orang tererealisasi sebanyak 19 orang .	Target keuangan sub kegiatan Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN pada Triwulan I-Triwulan III sebesar Rp. 1.937.587.948,-,- realisasi sebesar Rp.1.584.072.735 atau 82 %	
1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Indikator kinerja pada Sub kegiatan adalah Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang disusun Tepat Waktu. Target kinerjanya tercapai sesuai target kinerja	Target keuangan pada sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/Triwulan/semesteran SKPD TW I - TW III target sebesar Rp ,- Rp. 18.72.000,-	Agar lebih efisien dalam penggunaan anggaran

		yang telah ditetapkan dalam dokumen DPA SKPD Kecamatan Wotu dengan target Kinerja Triwulan I - Triwulan III adalah 9 Laporan terealisasi sebanyak 9 Laporan atau 100%	Realisasi Rp. 14.730.000 atau 81%.	
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			
1.3.1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Indikator kinerja pada Sub kegiatan Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun tepat waktu Target kinerjanya tercapai sesuai target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen DPA SKPD Kecamatan Wotu dengan target kinerja Triwulan I-Triwulan III adalah 3 Laporan terrealisasi sebanyak 3 Laporan atau 100%.	Target keuangan pada sub kegiatan ini tidak mencapai target keuangan berdasarkan anggaran pada TW I-TW III sebesar Rp. 10.290.000,- realisasi Rp. 6.310.000,- atau 78 %.	
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
1.4.1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Target Kinerja sudah Tercapai	Pada Sub Kegiatan ini realisasi Keuangan telah mencapai 49,48% dan masih ada beberapa SPJ Perjalanan Dinas yang belum di Pertanggungjawabkan dan menunggu SPD TW berikutnya	sisa SPJ yang belum di pertanggungjawabkan akan di proses di dan menunggu GU selanjutnya

1.4.2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Pada Sub Kegiatan Ini Target telah Tercapai	Pada Sub Kegiatan Ini realisasi Keuangan hanya sebesar 42,49% adapun sisa dari anggaran pada sub kegiatan ini telah dilakukan pergeseran pada sub Kegiatan lain disebabkan pada belanja Kontribusi Bimtek dibebankan pada BKPSDM	Pada Kegiatan Kontribusi Bimtek telah dilakukan Pergeseran pada Perubahan 2025 dan adapun sisa yang tdk di geser karena adanya realisasi pada belanja Kontibusi Bimtek
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah			
1.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indikator Kinerja Sub Kegiatan ini adalah Jumlah paket Komponen Instalsi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan. Target Sub kegiatan ini tercapai sesuai target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen DPA SKPD Kecamatan Wotu dengan target kinerja pada TW III-TW III 9 Paket. dan realisasi kerja sebanyak 9 paket	Target keuangan pada sub kegiatan ini tidak mencapai target keuangan berdasarkan anggaran KAS pada TW I-TW III sebesar Rp.2.125.000,- realisasi Rp. 1.390.000,- atau 65 %.	Target kinerja dan target keuangan sub kegiatan ini tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan dalam dokumen DPA SKPD Kecamatan Wotu dan anggran KAS,salah satu faktor mendukung tercapainya sub kegiatan ini karena adanya beberapa kegiatan yang menggunakan komponen instalasi listrik
1.5.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Indikator Kinerja Sub Kegiatan ini adalah Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan (paket). Target Sub kegiatan ini tercapai sesuai target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen DPA SKPD Kecamatan Wotu dengan target kinerja pada	Target keuangan pada sub kegiatan ini tidak mencapai target keuangan berdasarkan anggaran KAS pada TW I-TWIII sebesar Rp. 6.060.000.,- realisasi Rp. 4.770.000,- atau 79 %.	Target kinerja dan target keuangan sub kegiatan ini tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan dalam dokumen DPA SKPD Kecamatan Wotu dan anggran KAS,akan mengefesiensikan anggaran tahun berikutnya agar lebih efektif dan tepat sasaran sesuai target yg ditetapkan.salah satu faktor mendukung tercapainya sub kegiatan ini karena adanya kebutuhan logistik kantor

		TW I-TW III 6 Paket. dan realisasi kerja sebanyak 6 paket		sangat vital dalam menunjang kebersihan lingkungan kantor Camat Wotu.
1.5.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan ini adalah Jumlah paket Barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (paket)). Target Sub kegiatan ini tercapai sesuai target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen DPA SKPD Kecamatan Wotu dengan target kinerja pada TW I-TW 3 Paket. dan realisasi kerja sebanyak 2 paket 66 %	Target keuangan pada sub kegiatan ini tidak mencapai target keuangan berdasarkan anggaran KAS pada TW I-TW III sebesar Rp. 8.000.000,- realisasi Rp. 6.538.000,- atau 82 %.	Target kinerja dan target keuangan sub kegiatan ini tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan dalam dokumen DPA SKPD Kecamatan Wotu dan anggaran KAS Pada Triwulan I-III 2025
1.5.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan ini adalah Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (dokumen) . Target Sub kegiatan ini tidak tercapai sesuai target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen DPA SKPD Kecamatan Wotu dengan target kinerja 36 Dokumen dan realisasi kerja sebanyak 36 Dokumen.	Target keuangan pada sub kegiatan ini tidak mencapai target keuangan berdasarkan anggaran KAS pada TW IV sebesar Rp. 3.150.000,- realisasi Rp. 1.800.000,- atau 57 %.	Target keuangan sub kegiatan ini tidak tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan dalam dokumen DPA SKPD Kecamatan Wotu ,salah satu faktor penyebab tidak tercapainya sub kegiatan ini adalah kesalahan dalam pembuatan spj.
1.5.5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Indikator Kinerja Sub Kegiatan ini adalah Jumlah laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) . Target Sub kegiatan ini tercapai sesuai target kinerja yang telah ditetapkan dalam	Target keuangan pada sub kegiatan ini tidak mencapai target keuangan berdasarkan anggaran KAS pada TW III sebesar Rp. 112.500.000,-	Target kinerja dan target keuangan sub kegiatan ini tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan dalam dokumen DPA SKPD Kecamatan Wotu dan anggran KAS

		dokumen DPA SKPD Kecamatan Wotu dengan target kinerja pada TW I-TW III 9 Laporan. dan realisasi kerja sebanyak 9 Laporan	realisasi Rp. 112.100.000,- atau 99,99 %.	
1.5.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indikator Kinerja Sub Kegiatan ini adalah Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (Laporan) . Target Sub kegiatan ini tercapai sesuai target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen DPA SKPD Kecamatan Wotu dengan target kinerja pada TW I-TW III 9 Laporan. dan realisasi kerja sebanyak 9 Laporan	Target keuangan pada sub kegiatan ini tidak mencapai target keuangan berdasarkan anggaran KAS pada TW IV sebesar Rp. 39.000.000,- realisasi Rp. 38.949.200,- atau 99,87 %.	Target kinerja dan target keuangan sub kegiatan ini tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan dalam dokumen DPA SKPD Kecamatan Wotu dan anggran KAS
1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
1.6.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indikator Kinerja Sub Kegiatan ini adalah Jumlah peralatan mesin lainnya yang diadakan (unit) . Target Sub kegiatan ini tercapai sesuai target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen DPA SKPD Kecamatan Wotu dengan target kinerja pada TW II-TW III 2 Unit. dan realisasi kerja sebanyak 2 Unit	Target keuangan pada sub kegiatan ini tidak mencapai target keuangan berdasarkan anggaran KAS pada TW II-TW III sebesar Rp. 17.000.000,- realisasi Rp.15.318.000,- atau 99,87 %.	Belanja modal pengadaan barang dan jasa dilakukan dengan cara melalui proses e-katalog yang memudahkan dan mengefesiensikan anggaran (Cepat,Murah dan terjangkau)

1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
1.7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Indikator Kinerja Sub Kegiatan ini adalah Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat . Target Sub kegiatan ini tercapai sesuai target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen DPA SKPD Kecamatan Wotu dengan target kinerja pada TW I-TW III 9 Laporan. dan realisasi kerja sebanyak 9 Laporan	Target keuangan pada sub kegiatan ini tidak mencapai target keuangan berdasarkan anggaran KAS pada TW IV sebesar Rp. 11.255.000,- realisasi Rp. 7.698.000,- atau 58 %.	Target keuangan sub kegiatan ini tidak tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan dalam dokumen DPA SKPD Kecamatan Wotu dan anggran KAS karena Belanja ATK berdasarkan kebutuhan
1.7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indikator Kinerja Sub Kegiatan ini adalah Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat . Target Sub kegiatan ini tercapai sesuai target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen DPA SKPD Kecamatan Wotu dengan target kinerja pada TW I-TW III 9Laporan. dan realisasi kerja sebanyak 9 Laporan	Target keuangan pada sub kegiatan ini tidak mencapai target keuangan berdasarkan anggaran KAS pada TW III sebesar Rp. 34.000.000,- realisasi Rp. 23.060.835,- atau 68 %.	Target kinerja dan keuangan sub kegiatan ini tdk tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan dalam dokumen DPA SKPD Kecamatan Wotu dan anggran KAS pada TW I-TW III salah faktor tidak tercapainya realisasi kinerja dan keuangan adalah realisasi sesuai dengan kebutuhan atau pemakaian daya listrik yang digunakan.Belanja pembayaran listrik sesuai dengan jumlah pemakaian listrik setiap bulannya dan adanya hasil pemeriksaaan BPK terkait Belanja Listrik Rujab tidak boleh dibayarkan karena tidak terdapat dalam perbub tentang rumah dinas
1.7.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indikator Kinerja Sub Kegiatan ini adalah Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan . Target Sub kegiatan ini tercapai sesuai	Target keuangan pada sub kegiatan ini tidak mencapai target keuangan berdasarkan anggaran KAS pada TW II sebesar Rp. 5.025.000,-	Target kinerja dan target keuangan sub kegiatan ini tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan dalam dokumen DPA SKPD Kecamatan Wotu dan anggran KAS pada TW II

		target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen DPA SKPD Kecamatan Wotu dengan target kinerja pada TW II 2 Laporan dan realisasi kerja sebanyak 2 Laporan.	realisasi Rp.5.025.000,- atau 100 %.	
1.7.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Indikator Kinerja Sub Kegiatan ini adalah Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan . Target Sub kegiatan ini tercapai sesuai target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen DPA SKPD Kecamatan Wotu dengan target kinerja pada TW I-TW III 9 Laporan dan realisasi kerja sebanyak 9 Laporan.	Target keuangan pada sub kegiatan ini tidak mencapai target keuangan berdasarkan anggaran KAS pada TW III sebesar Rp. 126.220.000,- realisasi Rp. 96.880.000,- atau 71 %.	Capaian target keuangan kurang dari pada target yang telah ditetapkan pada anggaran KAS pada TW IV karena adanya kesalahan dalam penginfutan SPP dan SPM pada belanja pembayaran honorarium upah jasa pada bulan Januari-Mei 2024.
1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
1.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan ini adalah Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya dan perizinannya. Target Sub kegiatan ini tercapai sesuai target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen DPA SKPD Kecamatan Wotu dengan target kinerja pada TW IV 5 Unit	Target keuangan pada sub kegiatan ini tidak mencapai target keuangan berdasarkan anggaran KAS pada TW I-TW III sebesar Rp. 11.255;.000,- realisasi Rp. 9.268.350,- atau 50,23%.	Akan mengefisienkan angggran tahun berikutnya

		dan realisasi kerja sebanyak 5 Unit		
1.8.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indikator Kinerja Sub Kegiatan ini adalah Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara. Target Sub kegiatan ini tercapai sesuai target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen DPA SKPD Kecamatan Wotu dengan target kinerja pada TW I-III 18 Unit dan realisasi kerja sebanyak 10 Unit	Target keuangan pada sub kegiatan ini tidak mencapai target keuangan berdasarkan anggaran KAS pada TW III sebesar Rp. 8.170.000,-, realisasi Rp.2.700.000 -- atau 33. %.	Target kinerja dan keuangan sub kegiatan ini tdk tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan dalam dokumen DPA SKPD Kecamatan Wotu dan anggran KAS pada TW I- TW III salah faktor tidak tercapainya realisasi kinerja dan keuangan adalah realisasi sesuai dengan kebutuhan
1.8.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Indikator Kinerja Sub Kegiatan ini adalah Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi. Target Sub kegiatan ini tercapai sesuai target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen DPA SKPD Kecamatan Wotu dengan target kinerja pada TW I-III 2 Unit dan realisasi kerja sebanyak 2 Unit	Target keuangan pada sub kegiatan ini tidak mencapai target keuangan berdasarkan anggaran KAS pada TW III sebesar Rp. 10.000.000,-, realisasi Rp. 10.000.000- atau 100 %.	Target kinerja dan target keuangan sub kegiatan ini tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan dalam dokumen DPA SKPD Kecamatan Wotu dan anggran KAS
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
2.1	<i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</i>			
2.1.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Pada Sub Kegiatan Target Kinerja 12 Laporan telah Tercapai 75%	Realisasi Keuangan Pada Sub kegiatan ini Sebesar 45% ,dan	untuk Anggaran Sub kegiatan ini akan di Optimalkan di TW berikutnya,dan mengingat terkait untuk perjalanan dinas kegiatan ini telah

			pada sub kegiatan ini sebagian besar namun belum di GU kan.	berkurang setelah adanya pengurangan Anggaran.
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
3.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			
3.1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Pada Sub kegiatan ini target Kinerja 1(satu) Laporan dan tercapai 100 % pada TW I	Pada Sub kegiatan Musrebang realisasi keuangan mencapai 100% pada TW I	Pada Sub Kegiatan ini sudah terlaksana dikarenakan kinerja pada sub kegiatan ini tercapai
3.1.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pada Sub kegiatan ini target Kinerja 12 Laporan dan tercapai dengan 9 laporan	Pada Sub kegiatan ini target keuangan mencapai 75 %, terkait realisasi keuangan kurang pada tirwulan III	Kegiatan mencapai target sesuai pada triwulan III,
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
4.1	<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentaman dan Ketertiban Umum</i>			
4.1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Pada Sub Kegiatan Target Kinerja 4 Laporan dengan Capaian 100%	Realisasi Keuangan pada Sub Kegiatan ini pada TW III telah mencapai 61,37 % adapun sisa atau selisih aggaran pada TW III yaitu sebesar 35,63% pada belanja makan dan minum rapat serta belanja alat/bahan kantor lainnya.	Pada sub kegiatan ini telah dilakukan pergeseran belanja pada anggaran perubahan yaitu belanja perjalanan dinas untuk kegiatan ini sudah tidak sesuai dengan yang sudah dianggarkan seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Untuk sub kegiatan ini telah berkurang dan berjalan normal sehingga kinerja pada sub kegiatan ini tetap tercapai
4.1.2	Harmonisasi hubungan antara tokoh agama dan tokoh masyarakat	Pada Sub Kegiatan Target Kinerja 4 Laporan dengan Capaian 100%	Realisasi Keuangan pada Sub Kegiatan ini pada TW III telah mencapai 29,33 % adapun sisa atau selisih aggaran pada TW III yaitu sebesar 70,67% pada	Pada sub kegiatan ini telah dilakukan pergeseran belanja pada anggaran perubahan yaitu belanja perjalanan dinas untuk kegiatan ini sudah tidak sesuai dengan yang sudah dianggarkan seperti pada tahun-tahun

			perjalanan dinas, belanja makan dan minum rapat serta belanja alat/bahan kantor lainnya.	sebelumnya. Untuk sub kegiatan ini telah berkurang dan berjalan normal sehingga kinerja pada sub kegiatan ini tetap tercapai
4.2	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			
4.2.1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Pada Sub Kegiatan Target Kinerja 4 Laporan dengan Capaian 100%	Realisasi Keuangan pada Sub Kegiatan ini pada TW III telah mencapai 84,82 % adapun sisa atau selisih anggaran pada TW III yaitu sebesar 15,18% pada belanja makan dan minum rapat serta belanja alat/bahan kantor lainnya.	Pada sub kegiatan ini telah dilakukan pergeseran belanja pada anggaran perubahan yaitu belanja perjalanan dinas untuk kegiatan ini sudah tidak sesuai dengan yang sudah dianggarkan seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Untuk sub kegiatan ini telah berkurang dan berjalan normal sehingga kinerja pada sub kegiatan ini tetap tercapai
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
5.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			
5.1.1	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pada Sub Kegiatan ini pelaksanaan tidak tepat waktu pelaksanaannya dikarenakan adanya kegiatan yang selalu bersamaan	Proses pelaksanaan pencairan keuangan/anggaran tidak tepat waktu	Memaksimalkan anggaran sesuai dengan prioritas kegiatan yang dibutuhkan
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
6.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			
6.1.1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Pada Sub Kegiatan ini telah dilaksanakan untuk TW II dan	Pelaksanaan kegiatan telah terlaksana 58% selanjutnya akan	Pelaksanaan Penyusunan dan penetapan APDES di Desa harus dilakukan pada Akhir

		selanjut akan dilaksanakan pada TW IV	dilaksanakan pada TW IV sesuai dengan jadwal kegiatan	Tahun berjalan dan awal tahun berikutnya anggaran di desa bisa lebih cepat diawal tahun.begitupun pelaksanaan kegiatan di desa
6.1.2	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Pada Sub kegiatan ini belum ada kegiatan terlaksana di Desa	Pada Sub kegiatan ini sampai dengan TW III realisasi keuangan belum berjalan terkait kegiatan monitoring pelaksanaan kegiatan BKK di desa dikarenakan belum adanya anggaran dana BKK yang dikelola oleh desa	Masih menunggu petunjuk teknis dari dinas terkait

Sumber: Kecamatan Wotu, Data diolah tahun 2025

3.4. Budaya Kerja Mempengaruhi Pencapaian Organisasi

Budaya kerja merupakan cerminan nilai, sikap, dan perilaku aparatur dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Budaya kerja yang baik akan membentuk lingkungan kerja yang disiplin, profesional, dan berorientasi pada hasil. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, budaya kerja yang positif menjadi fondasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan berintegritas.

Pencapaian kinerja yang baik berpengaruh signifikan terhadap pembentukan dan penguatan budaya kerja organisasi. Kinerja yang tercapai sesuai target akan menumbuhkan semangat kerja, motivasi, serta rasa memiliki (sense of belonging) terhadap organisasi. Sebaliknya, capaian kinerja yang belum optimal dapat menjadi refleksi bagi organisasi untuk melakukan evaluasi terhadap disiplin, pola kerja, dan efektivitas pelaksanaan program. Oleh karena itu, konsistensi pencapaian kinerja menjadi faktor penting dalam menjaga budaya kerja yang produktif dan adaptif.

Dalam upaya memperkuat budaya kerja dan meningkatkan pencapaian kinerja, seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) perlu menginternalisasi nilai-nilai dasar BerAKHLAK sebagai panduan perilaku kerja, yaitu: Berorientasi Pelayanan (memberikan pelayanan cepat, tepat, dan solutif), Akuntabel (bertanggung jawab dan transparan), Kompeten (selalu meningkatkan kapasitas diri), Harmonis (membangun kerja sama dan menghargai perbedaan), Loyal (setia pada bangsa dan nilai organisasi), Adaptif (terbuka terhadap perubahan dan inovasi), serta Kolaboratif (bekerja sama untuk hasil terbaik).

Penerapan nilai-nilai BerAKHLAK secara konsisten akan memperkuat budaya kerja ASN yang profesional, berintegritas, dan berorientasi hasil, sehingga berdampak langsung terhadap peningkatan kinerja organisasi secara menyeluruh.

BAB IV

PENUTUP

Kecamatan Wotu telah menetapkan dua sasaran strategis yang selaras dengan RPJMD dan Renstra Kecamatan Wotu 2021–2026. Penetapan sasaran tersebut bertujuan untuk menjamin keselarasan antara tujuan organisasi dengan kebijakan pembangunan daerah, sekaligus menjadi acuan dalam mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah kecamatan.

Hasil Monitoring dan Evaluasi Triwulan II Tahun 2025 menunjukkan bahwa sebagian besar kegiatan masih dalam proses pelaksanaan sehingga evaluasi kinerja belum dapat dilakukan sepenuhnya. Indikator sasaran pertama, **Indeks Kepuasan Masyarakat, mencapai 83,47 dari target 85**, menunjukkan tingkat kepuasan yang sudah baik dan meningkat dari perolehan Triwulan sebelumnya namun belum memenuhi target. **Indikator sasaran kedua, Nilai AKIP, masih mengacu pada penilaian sementara Triwulan I sebesar 61,10** karena penilaian resmi Tahun 2025 baru dilakukan pada Triwulan I 2026. Sedangkan Realisasi Anggaran sebesar 69,26%.

Secara umum, capaian kinerja Kecamatan Wotu pada periode Laporan ini merupakan hasil dari komitmen, dedikasi, dan kerja sama seluruh jajaran aparatur dalam mewujudkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan. Melalui laporan ini, diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi, pembelajaran, dan acuan dalam peningkatan kualitas kinerja Kecamatan Wotu pada periode selanjutnya.

Demikian **Laporan Kinerja Kecamatan Wotu Tahun Anggaran 2025 Triwulan II** disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat, menjadi sarana perbaikan berkelanjutan, serta mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang semakin baik di Kecamatan Wotu.

Wotu, 07 Oktober 2025

Camat Wotu,



SIS DAWI, S.Sos., M.Si

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP : 19700908 200312 1 004